

**OTONOMI DAN KEWENANGAN PARTAI POLITIK
DI TINGKAT LOKAL DALAM PENCALONAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024
(Studi Pada PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu)**

(Tesis)

Oleh

Grace Purwo Nugroho
NPM 2426021002



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**OTONOMI DAN KEWENANGAN PARTAI POLITIK DI
TINGKAT LOKAL DALAM PENCALONAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024
(Studi Pada PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu)**

Oleh

Grace Purwo Nugroho

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

OTONOMI DAN KEWENANGAN PARTAI POLITIK DI TINGKAT LOKAL DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 (Studi Pada PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu)

Oleh

GRACE PURWO NUGROHO

Penelitian ini berfokus pada otonomi dan kewenangan partai politik di tingkat lokal pada pilkada serentak tahun 2024 di PDIP Kabupaten Pringsewu. Asumsi dasar penelitian ini disebabkan makin menguatnya isu sentralisasi partai politik pusat dalam penentuan calon kepala daerah, partai politik lokal hanya berfungsi melakukan penjaringan awal, administrasi dan informasi kondisi politik lokal. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme kewenangan partai ditingkat lokal dalam pilkada.

Analisis penelitian menggunakan teori pelebagaan parpol yang mengukur partai dari aspek kelembagaan yakni pengaturan internal (*systemnes*), otonomi pengambilan keputusan (*decisional autonomy*), nilai/ideologi dan citra publik partai (*reification*). Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan penafsiran fenomena sosial yang bersumber dari wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan 17 (tujuh belas) informan, terdiri dari pengurus PDIP, kandidat, akademisi dan aktivis lokal dan proses triangulasi melalui informan pengurus PDIP tingkat Provinsi Lampung serta pengurus Partai Gerindra dan kader Partai Persatuan Pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan rekrutmen kepala daerah dalam pilkada serentak 2024 masih dikendalikan partai ditingkat pusat, meskipun rekrutmen terbuka ditingkat lokal. Di PDIP Kabupaten Pringsewu kewenangan bersifat simbolik/administratif dan tugas menyerap aspirasi publik. Dampaknya dari sentralisme keputusan tersebut yakni otonomi partai lokal sangat rendah, terjadi sentralisme elit partai, praktik patronase dan lemahnya demokrasi internal partai yang berkontribusi terhadap kemunduran desentralisasi dan demokratisasi lokal. Aspek kebaruan penelitian ini dapat disimpulkan yakni kebutuhan proses integrasi desentralisasi pemerintahan dengan politik lokal, serta memperluas teori pelebagaan partai dengan dimensi otonomi partai lokal.

Kata Kunci : Otonomi Partai Politik, Pilkada, Pelebagaan Partai, PDI Perjuangan

ABSTRACT

AUTONOMY AND AUTHORITY OF POLITICAL PARTIES AT THE LOCAL LEVEL IN REGIONAL HEAD CANDIDATES IN 2024 (Study of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) in Pringsewu Regency)

By

GRACE PURWO NUGROHO

This research focuses on the autonomy and authority of local political parties in the 2024 simultaneous regional elections in the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) in Pringsewu Regency. The basic assumption of this research is that due to the increasing centralization of central political parties in determining regional head candidates, local political parties only function to conduct initial selection, administration, and provide information on local political conditions. The purpose of this research is to describe and analyze the mechanisms of local party authority in regional elections. The research analysis utilizes the theory of political party institutionalization, which measures parties from institutional aspects, including internal arrangements (systems), decision-making autonomy (decisional autonomy), values/ideology, and public image (reification). The research employed descriptive qualitative research methods and interpretation of social phenomena, based on interviews and observations. Interviews were conducted with 17 informants, consisting of PDIP officials, candidates, academics, and local activists. Triangulation was conducted through informants from PDIP officials at the Lampung Provincial level, Gerindra Party officials, and United Development Party (PPP) cadres. The research results show that the recruitment of regional heads in the 2024 simultaneous regional elections is still controlled by political parties at the central level, despite open recruitment at the local level. In the Pringsewu Regency PDIP, authority is symbolic/administrative and the task is to absorb public aspirations. The impact of this centralized decision is very low local party autonomy, the occurrence of party elite centralism, patronage practices, and weak internal party democracy that contribute to the decline of decentralization and local democratization. The novel aspect of this research can be concluded as the need for a process of integrating government decentralization with local politics, as well as expanding the theory of party institutionalization with the dimension of local party autonomy.

Keywords : Political Party Autonomy, Regional Elections, Party Institutionalization, PDI Perjuangan.

Judul Tesis : **OTONOMI DAN KEWENANGAN PARTAI
POLITIK DI TINGKAT LOKAL DALAM
PENCALONAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
(Studi Pada PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu)**

Nama Mahasiswa : **Grace Purwo Nugroho**

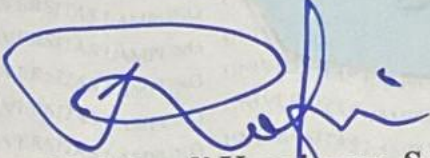
NPM : **2426021002**

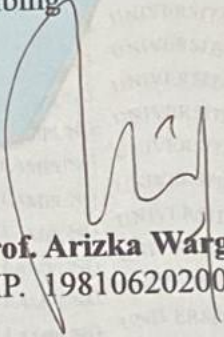
Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

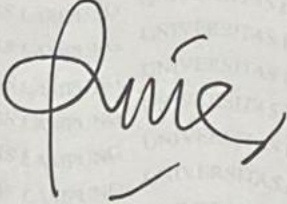
MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP. MA.
NIP. 197804302005011002


Prof. Arizka Warganegara, Ph.D.
NIP. 198106202006041003

2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**

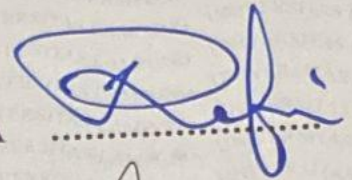

Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP. 196902191994032001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

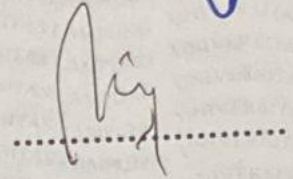
Ketua

Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP. MA



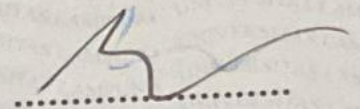
Sekretaris

Prof. Arizka Warganegara, Ph.D



Penguji Utama

Prof. Dr. Ari Darmastuti, MA



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustiana Zainal, S.Sos. M.Si
NIP. 19760821 200003 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. H. Murhadi, M.Si
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 12 Februari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan Judul **“OTONOMI DAN KEWENANGAN PARTAI POLITIK DI TINGKAT LOKAL DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 (Studi Pada PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu)”** adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas Pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dngan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Februari 2026
Yang membuat Pernyataan



Grace Purwo Nugroho
NPM. 2426021002

RIWAYAT HIDUP



Grace Purwo Nugroho, Lahir di Pringsewu 27 Agustus 1974 dari pasangan Ali Effendi (Alm) dan M.M Sumarsilah. Penulis menempuh pendidikan pertama kali di SDN 05 Teladan Sukoharjo lulus tahun 1987, melanjutkan ke SMP Negeri 2 Sukoharjo lulus tahun 1990 dan Di SMA Negeri I Pringsewu lulus tahun 1993. Tahun 1994 diterima menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) dan lulus tahun 1999. Pada tahun 2024 terdaftar sebagai mahasiswa di Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah (POLOKDA).

Penulis aktif berprofesi sebagai advokat di Lampung dari tahun 2000 hingga sekarang dan aktif menjadi anggota/pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Periode 2025-2030.

MOTTO

“Aku tidur dan bermimpi bahwa hidup adalah sebuah kebahagiaan. Aku terbangun dan melihat bahwa hidup adalah pengabdian. Aku bertindak dan lihatlah, pengabdian adalah sebuah kebahagiaan.” ***-Rabindranath Tagore***

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini dipersembahkan kepada keluarga luar biasa :

Istri Tercinta

Dwi Novita Tisnawati, S.E

Anak-anak Tersayang

Aura Carissalonika

Bagus Linuwih Pastiko

Ibunda

M.M. Sumarsilah

Adik-adik

Hetwijis Vera Vinsana, S.Pd

Heri Kesno Wibowo

Bagas Setyo Wibisono

Anabul Setia

Ciro dan Cimot

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

Terimakasih untuk semua dukungan dan doa dalam penyelesaian tesis ini

SANWACANA

Mengucap syukur atas berkah Tuhan Yang Maha Esa hingga penulis menyelesaikan naskah tesis dengan judul **“OTONOMI DAN KEWENANGAN PARTAI POLITIK DI TINGKAT LOKAL DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 (Studi Pada PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister di Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis dengan penuh kesadaran bahwa penulisan tesis ini masih banyak kelemahan dan kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Data-data yang diperoleh masih diperlukan pendalaman dan dikonfirmasi masih secara ilmiah menggunakan teori yang sesuai. Penyelesaian tesis ini merupakan kolaborasi banyak pihak sehingga dapat selesai lebih cepat, suatu kehormatan bagi penulis untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkenan membantu penyelesaian tesis ini, diantaranya :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.S, I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Murhadi, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustiana Zainal, S.Sos. M.Si selaku Dekan FISIP Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP, MA selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Pembimbing Akademik dan Pembimbing Utama Tesis ini.
6. Ibu Prof. Dr. Ari Darmastuti, MA selaku dosen penguji penulis yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulisan tesis ini.

7. Prof. Arizka Warganegara, Ph.D, selaku dosen pembimbing pendamping yang banyak melakukan tinjauan dan bantuan referensi teori tesis ini.
8. Segenap dosen-dosen Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila : Prof. Hertanto, Ph.D, Prof. Dr. Syarief Makhya, Ibu Dr. Tabah Maryana, Dr. Pitojo Budiono, Dr. Maulana Mukhlis semoga mereka terus melanjutkan karya akademik didalam maupun diluar kampus.
9. Segenap staf akademik Mbak Fitri Dkk, terima kasih dukungan dalam urusan administrasi akademik.
10. Temen-temen Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 2024, Igbal. Annisa Gusniar, Yayang Cantika, Al Fadilah, Salsabil Qurrota, Nazira, Arif Roy, Dwi Agung, Rafli Sandy, Justitia, Allif Panszha, Lisma Amelia, Nasir, Iqhlas Alvajri, Vernanda, Maria Heranita, Regita, Novika, S Khodijah, Citra Gustining, Rama, Norislam Deuloh (Mahasiswa Thailand). Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan dalam studi MIP di FISIP Unila, semoga kita sukses dalam studi dan karir.
11. Para sahabat dan teman yang banyak memberi dukungan antara lain : Palgunadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu periode 2019-2025, Yusuf Kriswardi, Viktor Heri Sudibyo, Martono Wawan, Oka, Suprihatin, P. Hesti Kawuri, Eko Gas dll.
12. Untuk teman-teman PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu pengurus Periode 2019-2025, para narasumber dan informan penelitian.

Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian tesis ini, baik yang dapat disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran dan penelitian selanjutnya dalam bidang politik dan partai politik kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Februari 2026
Penulis

Grace Purwo Nugroho

DAFTAR ISI

	Halaman
SANWACANA	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 10
2.1. Partai Dan Pelembagaan Partai Politik	10
2.1.1. Pengertian Partai Politik	10
2.1.2. Pengertian Pelembagaan Partai Politik.....	12
2.1.3. Proses Pelembagaan Partai politik.....	14
2.1.4. Pelembagaan Baru Partai Politik	17
2.1.5. Otonomi Pengambilan Keputusan Dalam Partai Politik	19
2.2. Tipe Dan Fungsi Partai Politik.....	22
2.3 Rekrutmen Politik dan Seleksi Kandidat	28
2.4. Demokrasi dan Desentralisasi.....	32
2.5 Kerangka Pikir	34
 III. METODOLOGI PENELITIAN	 35
3.1. Tipe Penelitian	35
3.2. Fokus Penelitian.....	36
3.3. Lokasi Penelitian.....	37
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5. Penentuan Jenis Informan	39
3.6. Teknik Pengolahan Data	42
3.7. Teknik Analisa Data	43
3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	43

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1. Gambaran Umum.....	46
4.1.1. Profil Kabupaten Pringsewu	46
4.1.2. Profil DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu.....	49
4.1.3. Data dan Informasi Hasil Penelitian Di Lapangan	53
4.2 Hasil Dan Pembahasan	66
4.2.1 Proses Rekrutmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu.	66
4.2.2 Kewenangan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu Dalam Menentukan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	78
4.2.3. Analisis Dimensi Teori Pelembagaan Partai Politik Dan Demokratisasi Lokal Dalam Rekrutmen Kepala Daerah PDI Perjuangan Di Kabupaten Pringsewu	81
4.3 Temuan- Temuan Penelitian	124
4.3.1. Temuan Terhadap Pertanyaan Penelitian Bagaimana Proses Rekrutmen dan Kewenangan Dalam Penentuan Calon Kepala Daerah oleh PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu.	124
4.3.2. Temuan Terhadap Perkembangan Teori Pelembagaan Partai Politik Dalam Rekrutmen Kepala Daerah Di PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu Pada Pilkada 2024	127
4.3.3. Refleksi Temuan Penelitian Berlandaskan Konsepsi Dan Teori Pelembagaan Partai Politik	129
V. KESIMPULAN DAN SARAN	143
5.1. Kesimpulan	143
5.2. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA.....	149

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1. Data Peserta Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, 2017 dan 2024	2
Tabel 1.2. Pendaftar Calon Bupati/Wakil Bupati di PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu Pilkada Tahun 2024.....	4
Tabel 3.1. Data Informan dan Temuan Inti	39
Tabel 4.1. Daftar Bupati/Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu	47
Tabel 4.2. Pengurus PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu Periode 2010-2015.....	49
Tabel 4.3. Pengurus PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu Periode 2015-2019.....	50
Tabel 4.4. Pengurus PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu Periode 2019- 2024 Perpanjangan Jabatan Hingga Tahun 2025	51
Tabel 4.5. Perolehan 3 (tiga) Besar Suara Partai Pada Pemilu di Kabupaten Pringsewu	52
Tabel 4.6. Perbandingan Data Informan Terhadap Proses Rekrutmen Kepala Daerah Oleh PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu Dalam Pilkada 2024.....	55
Tabel 4.7. Perbandingan Data Informan Terhadap Kewenangan PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu Dalam Menentukan Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada 2024	59
Tabel 4.8. Pola Umum Hasil Temuan Wawancara Informan	65
Tabel 4.9. Profil Bakal Calon Bupati	71
Tabel 4.10. Profil Bakal Calon Wakil Bupati	73

DAFTAR SINGKATAN

AD/ART	: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
BPS	: Badan Pusat Statistik
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat.
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPW	: Dewan Pimpinan Wilayah
GOLKAR	: Golongan Karya
Gerindra	: Gerakan Indonesia Raya
IBN	: Institute Bhakti Nusantara
LPJ	: Laporan Pertanggung Jawaban
MK	: Mahkamah Konstitusi
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PAN	: Partai Amanat Nasional
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PERPPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PCNU	: Pengurus Cabang Nahdatul Ulama
PUU	: Pengujian Undang-Undang
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
SK	: Surat Keputusan
UMPRI	: Universitas Muhammadiyah Pringsewu
UU	: Undang-Undang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengisian jabatan politik pada tingkat kabupaten/kota mempunyai beberapa regulasi yang mengatur antara lain untuk pengisian anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) maka menggunakan undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pengisian jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah menggunakan UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah atau pilkada serta perubahan karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan untuk melaksanakan proses operasional pemerintahan di daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi menggunakan regulasi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan. Ketiga regulasi tersebut yang menjadi dasar legitimasi hukum dan politik keberadaan pemerintahan daerah di tingkat lokal baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Sebagai mandat dari desentralisasi demokrasi pada tingkat lokal maka pada tahun 2024 dilakukan agenda nasional pemilihan kepala daerah yang untuk selanjutnya disingkat pilkada, yang dilakukan secara serentak adapun wilayah yang mengikuti pilkada seluruh Indonesia sejumlah 37 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Di Provinsi Lampung pilkada serentak dilaksanakan pada level provinsi untuk jabatan gubernur dan 15 (lima belas) kabupaten/kota untuk memilih bupati/walikota. Pemilihan gubernur, bupati dan walikota tersebut untuk masa jabatan serentak periode tahun 2025-2030, adapun untuk kontestan atau jumlah peserta pilkada di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Detik (2024), jumlah peserta pilkada bervariasi dari 2 (dua) hingga 4 (empat) calon, dan dalam pilkada serentak tahun 2024 terdapat calon tunggal yakni di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Barat.

Pilkada serentak 2024 di Provinsi Lampung ini hampir tidak ada daerah, baik kabupaten atau kota yang terdapat calon kepala daerah independen atau calon perseorangan dengan dukungan pemilih setempat. Keseluruhan pasangan calon kepala daerah berlaga di Provinsi Lampung diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, sehingga partai politik menjadi titik sentral dalam pencalonan dalam pilkada dan aktor demokrasi yang vital, dalam rekrutmen calon, (Sabarudin, 2024). Penelitian ini akan mengambil lokus atau lokasi di Kabupaten Pringsewu pada pilkada serentak tahun 2024. Pemilihan lokasi lebih didasarkan kepada keunikan kabupaten Pringsewu yang baru berdiri kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan sebagai daerah otonom baru dan telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali pilkada yakni pilkada tahun 2011, 2017 dan 2024 yang selalu diwarnai dengan calon lebih dari dua hingga lima pasangan, (Antara, 2011).

Tabel 1.1. Data Peserta Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, 2017 dan 2024

No	Periode Pilkada	Nama Calon	Partai Pengusung	Keterangan
1.	2011	Ririn – Subhan Effendi Abdullah Fajri Aulia – Tri Parwoto Untung Subroto – Purwantoro Sujadi Saddat - Handitya	Golkar, PPP PAN, Hanura Gerindra, PKPB, PDK, PDP, PKB PDI Perjuangan, Demokrat, PKS, PKNU, PKPI	Pemenang
2.	2017	Sinung Gatot – Mat Alfi Asha Ardian Saputra - Arimbi Sujadi Saddat – Fauzi Siti Rahma - Edi Agus Yanto	Perseorangan PDI Perjuangan, PPP Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat, PKB PAN, Nasdem	Pemenang
3.	2024	Fauzi - Laras Adi Erlansyah – Al Huda Riyanto – Umi Laila Ririn Kuswantari- Wiriawan	PDI Perjuangan, PKB Demokrat, PAN PKS, Gerindra Golkar, Nasdem, PPP	Pemenang

Sumber: Data diolah penulis, (2025)

Dinamisnya pilkada di Kabupaten Pringsewu ditandai dengan antusiasnya pihak yang hendak mencalonkan diri dan dinamika aktivitas partai politik dalam melakukan penilaian terhadap calon-calon yang muncul maupun mendaftar. Bahkan dalam pilkada 2024 yang secara umum cenderung jumlah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang cenderung sedikit, bahkan di kabupaten Lampung Barat dan Tulang Bawang Barat hanya terdapat calon tunggal tetapi di Kabupaten Pringsewu dan Mesuji terdapat 4 (empat) calon kepala daerah yang berlaga dalam pilkada serentak 2024.

Penelitian ini akan melakukan pendalaman bagaimana otonomi partai di tingkat lokal dalam rekrutmen pilkada serta melakukan kajian bagaimana PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu melakukan rekrutmen politik calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada, dalam pilkada 2024 yang lalu rekrutmen dilakukan dengan cara membuka pendaftaran calon kepala daerah yang dilaksanakan pada tanggal 16 April- 5 Mei 2024, sesuai informasi dari Lampung Post (2024). Terhadap argumentasi utama kenapa PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu menjadi lokasi dan menjadi objek penelitian dikarenakan dalam pilkada tahun 2024 membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara terbuka dengan jumlah pendaftar yang cukup banyak, (PDIP, 2024) :

Tabel 1.2. Pendaftar Calon Bupati/Wakil Bupati di PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu Pilkada Tahun 2024

No.	Nama Bacalon	Daftar Sebagai	Latar Belakang
1.	Fauzi	Bupati	Wakil Bupati Pringsewu 2017-2022
2.	Adi Erlansyah	Bupati	PJ. Bupati Pringsewu 2022-2024
3.	Ririn Kuswantari	Bupati	Politisi Partai Golkar
4.	Budiman, P.M	Bupati	Sekda Pringsewu 2015-2020
5.	Maulana M. Lahudin	Bupati	Politisi PKB
6.	Taufik Qurohim	Bupati	Ketua PCNU Pringsewu 2015-2025
7.	Heridian	Wakil Bupati	PDI Perjuangan-Pengurus DPC
8.	Yurizal	Wakil Bupati	Anggota DPRD, PDI Perjuangan
9.	Nurhasanah	Wakil Bupati	Politisi PDI Perjuangan
10.	Nurul Hidayah	Wakil Bupati	Advokat
11.	Andreas Andoyo	Wakil Bupati	Mantan Komisioner KPU Pringsewu
12.	Aris Wahyudi	Wakil Bupati	PDI Perjuangan, Anggota DPRD Pringsewu
13.	Fajar Fakhlevi	Wakil Bupati	Mantan Komisioner Bawaslu Pringsewu
14.	DROB Hakiki	Wakil Bupati	Ketua HIPMI Kab. Pringsewu

Sumber: PDI Perjuangan Pringsewu, (2025)

Pada akhirnya untuk pilkada tahun 2024 PDI Perjuangan mendaftarkan pasangan Fauzi sebagai calon bupati dan Laras Tri Handayani sebagai calon wakil bupati yang sebelumnya tidak mendaftar di PDI Perjuangan pada waktu pendaftaran, tetapi yang bersangkutan adalah kader dan anggota PDI Perjuangan sekaligus putri tokoh senior partai yaitu Mukhlis Basri yang berasal dari Lampung Barat.

Salah satu hal yang sering menjadi persoalan dalam pemilihan kepala daerah adalah partai politik saat ini terutama pengurus pusat memiliki kewenangan yang besar dan final dalam penetapan calon kepala daerah di suatu tempat dan seringkali terjadi pengurus pusat memiliki agenda yang sangat berbeda dengan daerah, (Permana, 2022). Penyelenggara pemilu/pilkada sendiri mewajibkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 8 Tahun 2024 menetapkan bahwa calon

kepala daerah yang diusung partai politik harus melampirkan dokumen rekomendasi dari pengurus pusat yang bersifat mutlak dan pengurus tingkat Provinsi dan kabupaten wajib mentaati, (PKPU, 2024). Ketentuan ini yang kemudian menjadi pengurus pusat partai menjadi begitu dominan dalam rekrutmen politik kepala daerah dan akibat dominasi tersebut juga ditengarai maraknya dinasti politik dalam pilkada karena penentuan pencalonan yang bersifat sentralistik, (Fitriyah, 2020).

Bentuk ekstrem (*extrem case*) dari sentralisasi kekuasaan pengurus pusat partai politik dalam pilkada tahun 2024 di Lampung yakni keberadaan calon tunggal yaitu di Kabupaten Lampung Barat dan Tulang Bawang Barat. Proses sentralisme keputusan partai ini menjadikan partai politik menjadi aktor dominan yang memonopoli elektoral, masyarakat sipil tidak dapat berbuat banyak dalam pilkada, RMOLL, (2025). Keberadaan calon tunggal tersebut menandakan seluruh partai menyatukan diri pada satu pasangan calon, struktur partai pada tingkat lokal tidak mempunyai daya tawar dan tidak ada calon alternatif yang dapat dipilih. Kondisi ini menegaskan desentralisasi pemerintahan tidak otomatis melahirkan desentralisasi politik khususnya di partai politik tingkat lokal. Kabupaten Pringsewu dalam setiap pilkada masih diikuti lebih dari dua pasangan calon, sehingga peran politik lokal masih dapat berekspresi, sehingga perlu dilakukan pendalaman apakah partai politik lokal dapat berperan lebih aktif dalam pencalonan kepala daerah.

Dalam kasus-kasus konflik kewenangan partai pusat dan daerah salah satu contoh nyata adalah proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan walikota tahun 2020, DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta awalnya sepakat mengusung pasangan Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa sebagai calon walikota dan wakil walikota tetapi kemudian Gibran menyatakan maju dengan melakukan pendaftaran sebagai calon walikota Surakarta ke DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah, yang pada akhirnya direkomendasi oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) PDI Perjuangan dan berhak maju dalam pemilihan walikota solo tahun 2020 dan menganulir usulan pasangan yang sudah ditetapkan oleh partai di tingkat

Kota, (Wahyudi, 2021). Pencalonan Gibran nampaknya tidak dipersiapkan jauh hari pada waktu pembukaan pendaftaran hingga pendaftaran ditutup DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta. Dalam kasus lain terjadi pada Pilkada Tasikmalaya tahun 2017 yakni ketika Hendro dan Miftah Fauzi yang merupakan ketua/pengurus DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Tasikmalaya yang hendak maju menjadi calon walikota tetapi kemudian pengurus pusat DPP PAN justru menetapkan calon lain yang berasal dari luar dan bukan kader PAN yakni Dede yang incumbent berpasangan dengan Asep dari kader partai persatuan pembangunan (PPP), (Anggoro, 2020).

Urgensi dari penelitian adalah upaya menggali lebih dalam secara ilmiah mengenai peranan otonomi struktur-struktur partai pada tingkat kabupaten terhadap pencalonan kepala daerah dikaitkan dengan relasi dengan struktur partai di atasnya serta otonomi apa saja yang dimiliki oleh pengurus partai tingkat kabupaten. Dalam spektrum yang lebih luas selain upaya rekrutmen untuk kepentingan pilkada, rekrutmen yang tidak kalah penting di tingkat kabupaten/kota adalah rekrutmen pengurus partai tingkat kabupaten dan Provinsi tiap 5 (lima) tahunan dan rekrutmen pada penyusunan calon legislatif yang akan dimajukan dalam pemilu nasional secara berkala. Semua rekrutmen politik baik untuk pilkada, penentuan pengurus partai, pencalonan legislatif akan membawa dampak dinamika yang sangat kompleks dan khas di masing-masing partai.

Otonomi partai dalam pencalonan kepala daerah dalam riset sebelumnya ditemukan fenomena seringkali calon kepala daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal baik individu calon maupun faktor pendukung lainnya yang dianggap bermanfaat secara politik dan ekonomi, (Irgiawan, 2023). Pragmatisme politik dan ekonomi dalam pemilihan kepala daerah secara langsung juga mempengaruhi partai politik dalam menentukan calon berkaitan dengan kepentingan kekuasaan dan uang lebih menjadi pertimbangan daripada nilai ideologi partai dan prinsip-prinsip partai, (Jamil dkk, 2024). Peran partai di tingkat lokal baik kabupaten/kota otonomi partai pada umumnya lebih banyak pada upaya melakukan peningkatan partisipasi pemilih, (F & Irfan, 2025). Pendidikan politik, (Valentina, 2022). Komunikasi

publik, (Jurdi, 2024). Pemenangan kandidat dan sosialisasi ke tingkat bawah, tidak banyak mengulas mengenai peran dalam rekrutmen politik terutama calon untuk pilkada atau calon legislatif, (Gyarani dkk, 2025).

Pada penelitian terdahulu dalam isu partai politik dan pilkada didapat isu-isu antara lain peranan partai dalam melakukan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih di tingkat lokal, studi di pada partai PAN dan Gerindra kabupaten Solok, (Suryani & Suryanef, 2022). Dalam penyelenggaraan pilkada juga terdapat dinamika oligarki akibat ketergantungan pada elit politik tertentu yang dominan dan memastikan posisi kunci dalam pencalonan dalam pilkada, studi pada pilkada Medan, (Ananda Adhianugrah, 2023). Studi pilkada mengenai peran partai politik baik pengusung dan pendukung juga menjadi objek riset karena dalam pilkada target utama setelah resmi pendaftaran adalah melakukan kemenangan calon baik menggunakan instrumen partai politik atau instrumen sosial lainnya, (Suyide, 2023). Isu pencegahan terbentuknya dinasti politik di daerah juga menjadi fokus riset terutama dalam proses rekrutmen oleh partai politik di tingkat lokal dalam pilkada serta peran partai untuk mendukung pencegahan terbentuk dinasti atau oligarki politik, (Nika, 2021). Politik keluarga dan pola rekrutmen oleh partai politik yang menunjukkan partai politik seringkali kesulitan dalam rekrutmen pilkada karena variabel yang begitu kompleks, (Mukaromah dkk, 2022).

Penelitian terdahulu juga banyak dibahas mengenai dinamika tokoh agama dan ulama dalam pilkada, (Madani, 2023). Studi mengenai keputusan pembentukan koalisi partai dan kepentingan yang berbeda dalam pencalonan kepala daerah, (Leda, 2023). Munculnya konflik internal partai dalam pencalonan pilkada, (Muh Suparman & Rahmatunnisa, 2022). Pilkada dan demokratisasi di tingkat lokal, (Marwazi & Fatimah, 2019). Fenomena semakin banyaknya partai mendukung pencalonan tunggal dalam pilkada, (Rahman dkk, 2022).

Gap penelitian ini terlihat dari penelitian terdahulu dalam membahas mengenai pilkada di tingkat lokal ditemukan diatas lebih banyak membahas fungsi politik secara umum yakni kaitan pilkada dengan pendidikan politik, partisipasi pemilih,

pemenangan dan komunikasi publik partai dan belum banyak membahas mendalam mengenai otonomi dan kewenangan partai penentuan pencalonan dalam pilkada. Gap penelitian lain adalah kewenangan struktural partai dalam konteks pencalonan kepala daerah baik kewenangan partai di tingkat lokal dan pusat, penelitian mengenai gagasan distribusi kewenangan dalam struktur internal partai baik kabupaten, Provinsi dan pusat masih minim terutama terkait pencalonan eksekutif lokal. Penelitian ini diharapkan menawarkan sudut pandang baru mengenai dinamika relasi pusat-daerah dalam seleksi kandidat politik dalam rekrutmen kandiad kepala daerah di internal PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu.

Pemilihan PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu sebagai lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan metodologis yang merujuk pada pendekatan studi kasus (*case study*). Metode studi kasus merupakan metode tepat untuk menelaah suatu fenomena politik secara mendalam, kontekstual dan kasual, terutama ketika peneliti ingin memahami mengapa dan bagaimana suatu proses terjadi. Penelitian ini mengambil studi kasus tunggal (*single case study*) yang bersifat *deskriptif-explanatoris* dan fokus pada unit analisis DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu dalam konteks Pilkada serentak 2024. Studi juga menggunakan pendekatan diakronik terbatas untuk menjelaskan dinamika kewenangan politik lokal serta bertujuan generalisasi analitis terhadap pola kelembagaan dan sentralisasi kewenangan partai politik di Indonesia, (Gerring, 2007).

Dari berbagai latar belakang fakta, teori dan penulisan ilmiah diatas maka riset mengenai otonomi partai politik di tingkat lokal dalam rekrutmen politik belum menjadi objek riset yang sering dilakukan, dengan demikian upaya untuk melakukan eksplorasi terhadap otonomi partai dalam pencalonan pilkada masih sangat terbuka dan memiliki gap penelitian yang cukup tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Peran Partai politik sangat besar dalam rekrutmen politik kepala daerah, sehingga penelitian ini rumusan masalah yang diajukan adalah;

1. Bagaimana proses rekrutmen pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu dalam Pilkada Serentak 2024?
2. Bagaimana kewenangan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu dalam menentukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah pada Pilkada serentak tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Peran Partai politik sangat besar dalam menentukan perwakilan politik pada institusi negara dan pemerintahan, dengan demikian tujuan penelitian ini adalah;

1. Mendeskripsikan proses rekrutmen pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu pada Pilkada tahun 2024.
2. Melakukan analisis kewenangan dan otonomi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu dalam rekrutmen calon kepala daerah dan dan wakil kepala daerah pada pilkada tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap relevansi kewenangan partai politik di tingkat lokal dalam pengusulan dan penetapan calon kepala dikaitkan upaya mendorong demokratisasi di tingkat lokal dan mendukung proses demokratisasi desentralisasi politik terutama pada partai-partai di tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bagian studi ilmu terapan politik penelitian ini diharapkan mampu menjadi pembelajaran bagi partai politik di tingkat lokal untuk meningkatkan kualitas rekrutmen politik terutama pada pencalonan kepala daerah. Secara praktis juga dapat digunakan untuk mereview berbagai kewenangan dan hirarki partai pusat-daerah dalam menentukan mekanisme pencalonan yang lebih proporsional.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Partai Dan Pelembagaan Partai Politik

2.1.1. Pengertian Partai Politik

Secara filosofis partai politik akan terbentuk secara alamiah karena manusia secara berkelompok sebagai sapiens yang berakal budi cenderung akan berlomba berpartisipasi dalam kehidupan yakni untuk perlindungan diri, rasa aman dan rasa keadilan sesama manusia, akan tetapi filsuf Aristoteles pernah mengingatkan kekuasaan bersama yang tidak dikontrol akan rawan terjadi penyimpangan kekuasaan dan pada akhirnya menyengsarakan publik rakyat itu sendiri, dengan demikian terbentuknya gagasan sebuah partai selain membentuk kekuasaan atau pemerintahan, adalah mengelola kekuatan rakyat dalam berpartisipasi dalam sektor publik.

Definisi partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, dan kelompok ini memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional. Definisi lain terhadap partai, menyatakan partai adalah komunitas terorganisir untuk tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan yang pada akhirnya kekuasaan yang diperoleh akan memberi benefit terutama bagi anggota-anggota partai tersebut, (Budiarjo, 2007).

Beberapa ahli juga membangun teori bahwa partai-partai politik yang muncul adalah proyeksi dari struktur-struktur politik massa yang muncul ke permukaan ketika konsep perwakilan dalam kekuasaan politik mulai menjadi trend dalam negara modern. Sehingga setiap partai yang muncul akan berbeda dalam konsep pengelolaan isu, basis massa yang dimiliki, kultur, bahasa. Walaupun secara teori konsep partai adalah perebutan kekuasaan tetapi secara praktik akan berbeda-beda di setiap negara dan di dunia modern sekarang ini hampir tidak ada negara yang

tidak mempunyai partai politik hanya jenis, sifat dan jumlah yang berbeda beda (Heywood, 2019).

Dalam perkembangan modern juga muncul keberadaan partai karena memperjuangkan basis pemikiran tertentu dan dianggap ideal dalam membentuk pemerintahan dan mencoba mengelola struktur masyarakat berdasarkan pemikiran tertentu, kelompok partai tersebut misalnya partai komunis di Kuba, Korea Utara dan China, partai tersebut muncul karena sebuah konsep filsafat yang dianggap ideal, dan untuk menerapkannya dalam kekuasaan maka membutuhkan partai. Walau dianggap sudah tidak relevan, gagasan negara yang menggunakan partai berbasis komunisme masih ada hingga sekarang dengan berbagai modifikasi. Contoh lain adalah partai-partai yang bercirikan fasisme yang sempat ada antara lain NAZI di Jerman dan kekuasaan Mussolini di Italia, tetapi model fasisme mengalami kegagalan lebih cepat ketimbang model sosialis-komunis.

Dalam definisi yang lengkap identifikasi ciri khas organisasi partai antara lain :

- a. Organisasi partai harus bersifat jangka panjang dan untuk waktu yang tidak dapat ditentukan.
- b. Terdapat struktur organisasi dari pusat pemerintahan hingga tingkat terbawah sistem pemerintahan.
- c. Partai politik dibentuk untuk tujuan berkuasa baik level lokal maupun nasional, tujuan praktis ini yang membedakan dari organisasi lain.
- d. Partai politik membutuhkan dukungan publik untuk legitimasi kekuasaan, maka dengan demikian partai akan memobilisasi sumber daya untuk memperoleh simpati publik dan dan memperbesar legitimasi, (Firmanzah, 2018).

Pengertian dan definisi partai yang telah diuraikan diatas kita pahami bahwa keberadaan partai adalah perkembangan dari peradaban manusia, partai politik adalah penemuan canggih manusia yang berakal budi sekaligus memberi relevansi keberbedaan setiap orang. Keberadaan partai politik beriringan dengan proses

revolusi ilmu pengetahuan, revolusi industri dan tuntutan kebebasan dan kesamaan hak yang melahirkan konsep hak asasi manusia.

Dengan situasi yang berbeda-beda semua negara didunia baik yang masih terbelakang maupun maju menggunakan partai politik dalam mekanisme kekuasaannya. Disrupsi teknologi yang semakin maju dianggap belum bisa mewakili fungsi dan peranan partai, dalam partai politik manusialah yang menjadi kendali kehendak publik, maka jika hendak melihat kualitas partai politik akan terlihat dari kualitas pengurusnya, bentuk organisasinya dan yang terakhir pemilihan itu sendiri yang saling bersinggungan setiap ada kompetisi partai melalui pemilihan umum.

2.1.2. Pengertian Pelembagaan Partai Politik

Partai politik sebagai pembentuk kekuasaan suatu negara semestinya mempunyai model kelembagaan yang kuat karena jika partai lemah maka partisipasi politik publik akan tidak terkanalisasi dan dapat menyebabkan situasi yang penuh kekacauan. Partai politik adalah instrumen demokrasi yang bertugas melakukan transformasi perubahan masyarakat, dengan demikian partai politik secara kelembagaan harus menguatkan posisinya dengan memenuhi syarat-syarat antara lain, (Huntington & Fukuyama, 2006) :

- a. Partai yang kuat dari sisi organisasi dan struktur, karena partai politik memiliki fungsi mengorganisir partisipasi dan menjadi penghubung antara kekuatan sosial dan pemerintah, maka partai politik secara organisatoris harus memiliki struktur yang jelas dan mampu mengelola berbagai kepentingan kelompok sosial, partai politik yang terorganisir mencakup adanya hierarki, prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan.
- b. Partai politik juga membantu menciptakan stabilitas politik dan legitimasi politik dengan mengurangi disorganisasi masyarakat dan tindakan korupsi yang cenderung terjadi di masyarakat yang tidak memiliki struktur yang kuat.

Dalam teori lain yang melengkapi Huntington menyatakan kebutuhan akan pelebagaan yang kuat terhadap sebuah partai ditujukan agar partai politik menjadi entitas yang stabil, terorganisir dan diakui dalam sistem politik, hal tersebut mencakup pengembangan struktur internal yang kuat, rutinitas yang saling berinteraksi dan adanya penerimaan masyarakat, proses-proses ini penting untuk mendukung proses konsolidasi demokrasi. Derajat partai politik dikaitkan dengan proses pelebagaan partai dapat kita lihat dalam definisi dibawah ini, (Randall & Svåsand, 1993).

- a. Derajat kesisteman, yang akan berisi tingkat keteraturan, kompleksitas dan saling ketergantungan satu dengan yang lain. Konsep ini menekankan pentingnya konsistensi dan keteraturan dalam operasional partai politik.
- b. Derajat identitas nilai, aspek ini menekankan sejauh mana nilai-nilai dan ideologi partai terinternalisasi oleh anggota-anggotanya, hubungan partai dengan gerakan sosial lain yang dapat memperkuat identitas dan komitmen anggota sekaligus menunjukkan partai punya dukungan yang kuat dari masyarakat.
- c. Derajat otonomi partai dalam membuat keputusan hal ini akan menunjukkan tingkat independensi partai dari pengaruh eksternal, patronase, kelompok kepentingan dan tekanan sosial. Derajat otonomi yang tinggi akan efektif berfungsi mempertahankan identitas kepartaian.
- d. Derajat pengetahuan atau citra publik, hal ini ditandai dengan sejauh mana masyarakat memahami ideologi, tujuan dan program partai politik. Citra publik partai merupakan persepsi yang dimiliki masyarakat terhadap partai dan dipengaruhi oleh komunikasi, media dan pengalaman langsung masyarakat bersama partai.

Kelebagaan partai sendiri akan selalu terkait antara gagasan utama partai didirikan, fungsionalisasi dan alat untuk mengoperasionalisasi sebuah partai, karena jika sebuah gagasan tidak diorganisasi dengan baik maka akan sulit menentukan tahapan untuk pencapaian tujuan kepartaian. Pelebagaan kepartaian adalah fungsi internal yang akan sangat mempengaruhi aksi-aksi eksternal dalam

menjalankan fungsi partai, banyak pengalaman partai yang kelembagaannya lemah gampang goyah oleh konflik internal dan karena tidak terkonsolidasi sumber daya internalnya.

2.1.3. Proses Pelembagaan Partai politik

Pelembagaan partai adalah sebuah proses bagaimana partai politik secara organisatoris bekerja dan sekaligus proses partai politik berinteraksi dengan publik sekaligus mengelola berbagai dinamika internal partai politik. Pelembagaan partai politik berkorelasi terhadap soliditas partai sebagai entitas, sekaligus menghadapi kondisi eksternal yang sangat berpengaruh bagi internal, kalah dan menang dalam pemilu akan menimbulkan kontraksi dalam partai politik. Dengan demikian maka dalam proses pelembagaan partai politik yang sehat, maka hal-hal yang harus diperhatikan, (Leo dkk, 2023) :

- a. Penguatan identitas partai.
- b. Pengembangan budaya organisasi partai diantara anggota partai dan pengurus.
- c. Memastikan pendidikan politik bagi jajaran pengurus partai melalui sekolah partai.
- d. Peningkatan partisipasi anggota.
- e. Penguatan struktur.
- f. Jaringan relasi dengan kelompok masyarakat.
- g. Kemampuan adaptasi lingkungan politik.
- h. Pemanfaatan teknologi.
- i. Evaluasi dan adaptasi situasi politik.

Model kriteria sini secara terus menerus dilakukan tinjauan apakah aktivitas partai mendukung proses pelembagaan sebuah partai. Kriteria ini juga dapat dipakai sebagai panduan aktivitas partai dan evaluasi kinerja partai secara umum.

Mengenai problema kelembagaan partai Arizka Warganegara menemukan secara umum kelembagaan partai di Indonesia banyak mengalami masalah, baik partai yang sudah lama ada dan ikut dalam kompetisi pemilu ataupun partai baru yang mencoba melakukan modernisasi partai politik, kendala itu antara lain:

- a. Dominasi pimpinan yang dominan, partai politik Indonesia masih sangat bergantung pada figur, hampir semua partai masih memiliki pendiri-pendiri yang masih aktif hanya sebagian kecil yang sudah tidak lagi aktif. Hal ini dapat dipahami karena secara politik Indonesia mengalami demokratisasi belum lama dan secara efektif baru pasca reformasi 1998 partai mengalami kebebasan politik.
- b. Fenomena partai di Indonesia adalah ketidakjelasan karena semua partai mengarah pada jenis partai “semua bisa masuk”, kategorial kanan-kiri, islam-nasionalis sangat kontekstual berdasarkan tantangan setempat, hal ini dapat dipahami sebagai negara kepulauan kultur dan kemajuan wilayah sangat berbeda-beda, ditambah berbagai macam pluralitas.
- c. Kaderisasi yang tidak konsisten terutama dalam memilih calon dalam jabatan eksekutif, karena sistem pemilu langsung membutuhkan sumber daya yang besar maka tidak semua anggota partai mampu, tetapi untuk pencalonan dalam jabatan parlemen rata-rata partai sudah siap dengan kadernya.
- d. Lemahnya integritas internal sehingga muncul ketidakpuasan dari kalangan anggota partai dan publik.
- e. Pendanaan partai yang lemah sehingga partai sering tergantung pada faktor finansial dan kekuasaan politik setempat untuk melakukan ekstraksi pembiayaan.
- f. Isu korupsi sebagai bagian masalah semua partai, menjadi problem naik turun dukungan terhadap partai, (Rachmayani & Warganegara, 2023).

Dalam pelebagaan partai politik hal perlu diperhatikan lebih detail adalah dari mana sebuah partai akan dibangun dan dioperasikan untuk mendukung tujuan-tujuan partai sebab ketika sebuah nilai, ideologi, tujuan dan agenda partai disepakati dalam komunitas penggagas partai maka tingkat operasi teknis sangat menentukan,

yakni penyusunan organisasi partai dan dukungan administrasi kelembagaan. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam upaya memperkuat lembaga partai politik antara lain:

- a. Patronase yang berlebihan dikarenakan hubungan antara politisi dan kader atau kelompok kepentingan lain dilakukan secara pragmatis dan personal, sehingga bisa menimbulkan kerusakan integritas dan menghambat perkembangan demokrasi dalam satu partai.
- b. Partai diperhadapkan dengan biaya operasional yang tinggi dan lemahnya sumber daya, pendanaan yang terbatas dari negara dan iuran anggota atau iuran kader yang sudah menjabat tidak mencukupi sehingga mendorong elit partai melakukan negosiasi keuangan dengan pihak yang membutuhkan partai.
- c. Struktur partai yang masih oligarkis, hampir semua partai di Indonesia didirikan oleh individu atau kelompok yang dominan secara politik dan ekonomi dan ini pada akhirnya muncul kesulitan bagi anggota atau bahkan pengurus partai berpartisipasi secara aktif, dampak berikutnya sistem akuntabilitas kepartaian menjadi masalah.
- d. Kaderisasi yang dibangun tidak dinilai dalam kerangka meritokrasi atau penjenjangan berdasarkan kemampuan dan kualitas, kalau ada model aturan meritokrasi tetapi tidak dapat dijamin konsistensinya dan ini mendorong ketidakpuasan kader maupun pengurus partai.
- e. Regulasi Undang-undang belum mengatur secara detail dan mendukung penguatan kelembagaan partai, (Prayudi, 2019).

Dari beberapa hasil riset yang ditemui di atas, salah satu pokok agenda utama dalam menuju partai yang modern adalah pembenahan organisasi partai yang efektif penerapan merit sistem dan melakukan evaluasi ulang struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dan ideologi partai.

2.1.4. Pelembagaan Baru Partai Politik

Dalam teori kelembagaan baru partai politik (*The New Institutionalism*), otonomi partai dicerminkan dengan kemampuan partai politik dalam mengambil keputusan strategis, pengelolaan kader partai dan kemampuan pengambilan kebijakan internal secara independen dan terhindar dari pengaruh dari luar yang tidak sah. Otonomi partai yang lebih independen akan memungkinkan partai politik dapat mempertahankan identitasnya, mengamankan kebijakan dan strategi politik dalam lingkungan politik yang kompleks. Otonomi partai dalam praktik politik tidak dapat bersifat mutlak karena harus memperhatikan faktor lain yakni berkaitan dengan proses yang akuntabilitas dan interaksi norma sosial yang berlaku dalam sistem politik.

Otonomi partai dalam proses penguatan pelembagaan partai berfungsi untuk mendorong kemampuan partai politik dalam menjalankan mekanisme pengambilan keputusan, menjalankan peran sesuai dengan prinsip, ideologi dan kepentingan internal partai dan melakukan pengelolaan administrasi internal partai secara mandiri. Otonomi partai dalam konteks pelembagaan juga mencakup kebebasan partai dalam mengembangkan strategi memilih calon menetapkan visi/misi tanpa pengaruh yang dominan dari pihak lain sebagai bagian dari penyelenggaraan kedaulatan partai politik.

Konsep dasar dalam otonomi partai dalam pelembagaan partai dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain:

- a. *Historical Institutionalism* pendekatan ini menjelaskan pola kelembagaan tertentu yang merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang dari masa ke masa mengenai apa dan bagaimana sebuah partai politik menghasilkan produk politik dengan berdasarkan fakta-fakta sejarah yang sudah dilalui sebelumnya.
- b. *Rational Choice Institutionalism*, pendekatan ini dilakukan dengan mengedepankan manfaat yang akan diperoleh dari institusi partai politik dengan pertimbangan yang rasional, pendekatan ini memiliki asumsi bahwa

ketika aktor-aktor dalam lembaga partai politik dapat melakukan kalkulasi secara rasional bagi partai politik dengan demikian akan ditemukan manfaat yang maksimal dan mengurangi ketidakpastian.

- c. *Sociological Institutionalism*, pendekatan ini menyoroti mengenai bagaimana sebuah institusi partai politik dalam membentuk identitas dan cita-cita sosial. Pendekatan ini menghendaki bahwa kelembagaan politik bukan sekadar kalkulasi rasional tetapi juga menyatakan bahwa institusi politik tersebut sebagai simbol norma sekaligus praktik politik. Dengan demikian sebuah institusi partai politik dalam konteks sosiologis akan munculnya eksistensinya melalui makna sosial dan identitas politik yang dikehendaki, (Hal & C.R.Taylor, 1996).

Model otonomi partai politik di tingkat lokal dikaitkan dengan teori *the new institutionalisme* juga harus memenuhi berbagai hal penting dalam mendukung otonomi partai yakni:

1. Model pelembagaan politik baru partai politik menggunakan pendekatan yakni mengukur kemampuan institusi partai politik untuk mempertahankan otonomi partai supaya lebih independen. Konsep otonomi partai ini memungkinkan partai untuk mengembangkan kebijakan dan strategi secara mandiri yang berasal dari internal partai itu sendiri walaupun kesemuanya tidak terlepas dari struktur kekuasaan dalam sistem politik.
2. Partai politik dalam kelembagaan baru harus mempunyai kekuatan norma dan kemampuan mengelola aturan internal sendiri dengan tetap memperhatikan kekuatan yang ada dalam masyarakat dan kekuasaan eksternal lainnya sehingga keberadaan sebagai aktor utama dalam arena politik tetap kokoh, (March & Olsen, 1983).

Dalam kaitan ketegangan antara hubungan pengurus partai pusat dan daerah terutama yang menganut multi partai maka sering terjadi konflik yang disebabkan adanya dimensi hirarki dan sentralisasi dalam organisasi partai politik, konteks ini yang sering terjadi adalah peran pengurus pusat yang dominan dalam pengambilan

keputusan strategis seperti persoalan koalisi dan pencalonan kepala daerah, disisi lain unit partai di tingkat lokal adalah aktor penting di akar rumput yang bekerja membangun basis dukungan, relasi sosial dan mempunyai pengaruh di tingkat daerah.

Bentuk otonomi lokal dalam partai dalam model pelembagaan partai politik dapat muncul dalam berbagai bentuk yakni, otonomi administratif yaitu pengurus daerah diberi kebebasan mengelola program dan sumber daya, otonomi politik yakni hak partai di tingkat lokal menentukan calon kepala daerah, mitra koalisi dan platform partai di tingkat lokal, otonomi organisasi yakni mengatur keanggotaan dan struktur internal yang disesuaikan dengan kondisi daerah atau lokal. Otonomi partai di tingkat lokal merupakan prasyarat penting bagi berfungsinya desentralisasi demokrasi, sehingga dibutuhkan keseimbangan antara kekuasaan partai tingkat pusat dan daerah, karena jika pusat terlalu kuat maka kepemimpinan lokal bisa menjadi boneka dan legitimasi politik lokal menjadi lemah, sementara jika lokal terlalu otonom akan memunculkan fragmentasi partai atau konflik internal.

2.1.5. Otonomi Pengambilan Keputusan Dalam Partai Politik

Otonomi pengambilan keputusan (*decisional autonomy*) merujuk pada kemampuan partai untuk menentukan arah kebijakan, melakukan penyusunan strategi sendiri dan melaksanakan kepemimpinan organisasi kepartaian tanpa intervensi pihak eksternal. Dalam praktik partai politik dapat memiliki relasi atau hubungan dengan pihak luar baik kelompok buruh, agama, militer dan pengusaha, tetapi yang harus ditekankan adalah siapa yang paling dominan dalam menentukan sikap partai, jika partai masih menjadi pihak yang menentukan arah, maka otonomi partai politik masih dikatakan tetap terjaga, (Tomsa, 2008).

Indikator utama dalam mengukur otonomi partai memiliki beberapa unsur yakni : kontrol partai atas sumber daya keuangan, dominasi partai yang masih kuat diantara lembaga-lembaga pendukungnya, birokrasi organisasi yang kuat dan memiliki kebebasan partai politik untuk memilih pemimpin di kalangan internal.

Dalam pelebagaan partai politik otonomi dalam pengambilan keputusan (decisional autonomy) menjadi aspek kunci, otonomi dalam pengambilan keputusan mencerminkan tingkat keputusan dan kebijakan internal partai yang diambil secara mandiri tanpa campur tangan dari pihak eksternal. Otonomi pengambilan keputusan dalam konteks pelebagaan partai politik memiliki peran penting antara lain :

- a. Menjamin konsistensi dan stabilitas organisasi.
- b. Memperkuat sistem internal dan aturan internal organisasi, otonomi partai menghendaki partai politik memiliki mekanisme dalam pengambilan keputusan yang diatur secara formal.
- c. Memperkuat kemandirian dan keberlanjutan partai politik, otonomi yang tinggi memungkinkan partai menjalankan fungsinya secara mandiri dan tidak bergantung pada faktor eksternal seperti kekuasaan, tekanan elit politik yang dengan demikian memperkuat kapasitas partai dalam mengelola sumber daya manusia.
- d. Mengurangi ketergantungan pada tokoh sentral, kinerja partai yang solid dan bekerja pada sistem aturan partai yang kuat akan mencegah pengaruh personal tertentu dalam partai.

Dalam konteks Indonesia dalam kajian Dirk Tomsa (2008), otonomi pengambilan keputusan masih sangat dipengaruhi oleh kekuatan lain, hal ini terjadi karena:

- a. Terdapat ketergantungan partai politik pada sumber eksternal, banyak partai sangat tergantung pada donor besar pengusaha dan jaringan patronase dalam pembiayaan kampanye politik.
- b. Aparatur negara terutama militer sangat berpengaruh ketika partai hendak mengambil keputusan, walaupun pada masa setelah reformasi peran militer berkurang tetapi jaringan yang lama dan pengaruh birokrasi sangat kuat khususnya dalam distribusi jabatan di daerah.
- c. Politik uang (*money politic*) yang membawa pengaruh yang sangat besar partai politik dalam pengambilan keputusan, baik dalam rangka pencalonan legislatif, kongres partai dan rekomendasi pencalonan dalam

pilkada yang lebih sering ditentukan siapa yang membayar lebih banyak. Akibatnya partai-partai politik didominasi oleh elit-elit politik yang kaya dibanding kader yang berakar di basis massa.

- d. Oligarki elit internal, partai-partai besar di Indonesia cenderung dikendalikan oleh figur kharismatik yang seringkali menjabat sebagai ketua umum partai, hal ini mempengaruhi kebijakan yang cenderung *top-down*.
- e. Aturan formal partai yang terangkum dalam AD/ART seringkali tidak membatasi manuver elit, sehingga keputusan dalam rapat partai kadang hanya formalitas dan keberadaan anggota partai semakin jauh memiliki keikutsertaan dalam menentukan arah kebijakan, pengambilan keputusan yang merupakan produk kolektif seringkali tidak mencerminkan kehendak luas anggota.
- f. Tekanan media, koalisi politik dan organisasi keagamaan seringkali membatasi ruang otonomi partai, karena partai sibuk melakukan akomodasi dan menjaga citra publik semata. Hal ini menyulitkan partai politik menjadi organisasi yang mandiri.

Identifikasi permasalahan pelembagaan partai politik di Indonesia sangat kompleks, dan menjadi hambatan dalam memperkuat demokrasi yang stabil dan kuat. Problem pelembagaan partai politik di Indonesia secara umum antara lain, (Tomsa, 2008) :

- a. Lemahnya konsistensi dan soliditas internal, banyak partai mengalami fragmentasi dan faksi-faksi internal yang berujung pada perpecahan. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan dan lemahnya penguatan struktur organisasi karena faksi-faksi yang bersifat personalistik sering mengaburkan visi dan misi partai.
- b. Ketergantungan pada tokoh partai dan figur yang personalistik, pelembagaan partai di Indonesia saat ini sering tergantung pada tokoh sentral sehingga ketika tokoh tersebut meninggalkan partai maka struktur partai mengalami keruntuhan.

- c. AD/ART yang lemah dan tidak ada peraturan partai yang menjadi standar acuan dalam membuat keputusan partai dan seringkali bergantung pada kepentingan tokoh tertentu dan bersifat sesaat
- d. Akuntabilitas pengelolaan keuangan partai yang lemah, hal ini menjadi peluang terjadinya korupsi dalam internal partai.
- e. Sistem pengkaderan dan pengembangan organisasi sangat minim dilakukan sehingga proses kaderisasi pemimpin menjadi sering tidak berkelanjutan dan ini mengganggu terbentuknya budaya organisasi.
- f. Pengaruh politik uang dan patronase, banyak partai yang lebih banyak mengandalkan strategi politik uang dan patron-klientelisme daripada membangun pelembagaan partai yang kuat. Sehingga hal ini mengafirmasi bahwa partai politik di Indonesia masih bergantung pada kekuatan personal.
- g. Pengaturan hukum mengenai partai politik dan pemilu di Indonesia belum stabil, regulasi mengenai partai politik seringkali tidak mampu memberikan insentif yang cukup untuk mendorong reformasi internal partai yang lebih profesional.
- h. Keterbatasan pemanfaatan teknologi digital dan media untuk membangun relasi partai dengan pemilih atau calon pemilih,

Secara teoritis, pelembagaan yang kuat pada partai politik akan memperkuat otonomi partai dalam pengambilan keputusan, mengurangi ketergantungan pada aspek personal atau individual dan dapat meningkatkan kualitas demokrasi karena partai politik cenderung stabil dan berfungsi secara efektif. Tetapi untuk konteks Indonesia masih mempunyai tantangan seperti yang diuraikan diatas.

2.2. Tipe Dan Fungsi Partai Politik

Klasifikasi dan kategorial kemunculan partai-partai akan berkaitan dengan sejarah berdirinya, para pendiri, ideologi yang dianut, hubungan sosial dalam suku bangsa sebagai bagian identitas suatu partai. Kategorial partai-partai selalu berkaitan evolusi politik di suatu negara, baik evolusi karena kontraksi internal maupun karena pengaruh dari luar negara tersebut.

Tipologi partai-partai secara umum dapat dibedakan sesuai asas dan orientasinya yakni:

- a. Partai politik Pragmatis, yakni partai yang kegiatan dan programnya tidak terlalu kaku dengan doktrin atau ideologi tertentu, partai ini benar didirikan sesuai kemaun publik pemilih untuk menyokong pengurus partai ke jenjang kekuasaan, partai jenis ini dapat diidentifikasi dengan cara begitu mudahnya orang keluar suatu partai dan membentuk partai kemudian ikut pemilu, ada yang berhasil banyak pula yang gagal.
- b. Partai doktriner partai yang kegiatan dan programnya untuk mencapai sistem nilai yang diyakini, dan dalam pelaksanaannya kegiatan diawasi oleh pengurus partai agar sesuai dengan jalan ideologi partai. Partai model ini banyak di inspirasi oleh partai komunis/sosialis dan belakangan partai agama juga demikian.
- c. Partai Politik kepentingan, partai ini mengusung khusus agenda kelompoknya, kepentingan diluar partai ini menjadi sekunder, walau mestinya partai secara umum harus menerima semua aspirasi. Jenis partai ini misalnya partai buruh, partai petani, partai berbasis etnis dan agama tertentu. Karena berdasarkan kepentingan sektoral sehingga jarang memiliki daya tahan dan walaupun mendapat suara dalam pemilu, suara cenderung stagnan sukar untuk dikembangkan, (Isabela, 2022).

Konsep pembedaan tipologi pada partai biasanya dilakukan dengan melihat aksi-aksi lapangan sebuah partai dan tingkat konsistensi yang bisa dilihat, tipologi tidak dapat dijadikan dasar teoritik, lebih pada pengamatan kegiatan dan program partai. Secara lebih sistematis klasifikasi secara teoritis yang dapat digunakan untuk menggolongkan partai politik, yaitu :

- a. Partai Kader dan Partai Massa, partai kader lebih menunjukan terdapat sekelompok orang dengan kriteria tertentu disebut kader dan dianggap orang penting. Kepengurusan dan penugasan selalu diarahkan kepada kader terlatih dan dengan kontrol yang ketat. Model partai ini sering dipakai oleh partai komunisme dan fasis yang menghendaki loyalitas

tinggi, bahkan dalam perkembangan partai ini lebih merupakan status quo elit dan bercorak quasi-militer di beberapa tempat. Partai Massa, partai ini berbasis anggota dan menebar dukungan pemilihan semua, ciri utama partai ini lebih pada penekanan jumlah anggota ketimbang ideologi dan politik. Bahkan dalam perkembangannya menjadi partai *Catch- All* yakni partai “tampung semua yang ingin masuk” dan pernah diberikan oleh Otto K (1966).

- b. Partai-partai Representatif dan Integratif, model ini didefinisikan oleh sebagai partai representatif yaitu gagasan sebuah partai untuk menjamin suara perwakilan dapat disalurkan dalam parlemen, masuk dalam kategori partai pragmatis dan berdasarkan kebutuhan pasar. Partai integratif, partai ini lebih melakukan inisiatif memobilisasi, mendidik dan menjual ide-ide ke masyarakat daripada sekedar menyalurkan inspirasi, partai sosialis dan partai massa cenderung memakai model integratif.
- c. Partai Konstitusional dan Partai Revolusioner, partai konstitusional partai yang bergerak berdasarkan aturan konstitusi dan cenderung menghargai keberadaan partai lain. Partai Revolusioner, adalah partai yang akan mendekonstruksi sebuah sistem, dan menggantikan dengan model konstruksi politik partai yang bersangkutan, dan biasanya partai yang memiliki sayap militer dan quasi-legalisme, sering disebut Partai kiri radikal dan kanan radikal, dalam banyak kasus -partai ini justru antidemokrasi ditengah partai ini bisa muncul karena demokrasi, semacam penumpang gelap demokrasi.
- d. Partai Sayap Kiri dan Partai Sayap Kanan, partai-partai ini jelas memiliki agenda akan menghancurkan sistem yang ada dengan merebut kekuasaan dengan berbagai cara, bahkan dalam kategori tertentu lebih merupakan kekuatan militer dan mendorong terjadi revolusi rakyat, (Heywood, 2019).

Dalam kategori jumlah, partai digolongkan dalam 3 jenis dan ini lebih dilihat dari praktik-praktik partai di negara yang ada di dunia :

- a. Partai Tunggal, di negara komunis/sosialis menggunakan partai tunggal.
- b. Dwi Partai, partai dengan jumlah 2 ini banyak muncul di negara yang demokrasi maju, seperti USA, Selandia baru.
- c. Multi Partai, partai yang merupakan representasi kultur, agama dan masyarakat yang kompleks, negara yang relatif baru demokrasi banyak menganut ini, (Budiarjo, 2007).

Dalam perkembangan kontemporer muncul spesies baru partai yakni partai *“Match-All Party”* adalah partai yang cocok untuk semua lapisan sosial masyarakat dan tidak mengidentifikasi pada basis sosial tertentu, dan ini nampaknya masa peralihan ketika politik dan pemilih semakin individu dan menyulitkan identifikasi karakter partai karena individu mengalami atomisasi diri yakni manusia yang seolah tidak butuh pihak lain dalam bertindak kecuali karena kepentingan dirinya sendiri , penyebab muncul dari partai ini adalah :

- a. Perilaku pemilih yang pragmatis
- b. Tidak punya basis sosial tertentu ketika didirikan.
- c. Pendekatan rasional, pendekatan untung rugi bagi pemilih dan partai, (Aminuddin & Ramadhan, 2015).

Kemunculan spesies baru ini lebih pada bagaimana partai politik merespon konteks konstruksi sosial dengan melakukan adaptasi terhadap perilaku pemilih, dan konteks ini politik uang mulai dipraktekkan, ciri khasnya partai itu akan sangat oportunis berpindah orientasi politik setiap waktu, dan ini mengakibatkan dinamika politik yang cair dan gampang berubah karena tidak adalah komitmen nilai dalam melakukan aliansi kekuasaan, semuanya di lakukan demi eksistensi parpol dan politisinya.

2.2.1 Fungsi Partai Politik

Dalam praktik politik terutama hubungan antara partai politik dan demokrasi maka seringkali kita melihat fungsi yang sempit, yakni partai politik sebagai sarana dalam pemilihan umum baik legislatif maupun eksekutif. Penyempitan makna terutama di Indonesia diduga karena pembatasan aktivitas politik sejak 1965-1998 pada jaman orde baru dengan menerapkan model massa mengambang dan level aktivitas politik hanya di level kecamatan/distrik sedangkan di level desa/dusun partai politik hanya melakukan fungsi mobilisasi politik. Situasi ini lebih menandakan bahwa rakyat pemilih dianggap tidak kompeten terlibat, atau dianggap berbahaya sehingga hanya elit politik punya peran dan relatif mudah dikendalikan.

Definisi partai politik dengan melihat sistem dinegara yang bersangkutan karena di dunia ini baik demokratis maupun tidak demokratis sebuah negara selalu ditemui adanya partai politik dengan berbagai fungsi, (Budiarjo, 2007) :

- a. Partai politik dalam negara yang demokratis akan memiliki beberapa hal fungsional yakni:
 1. Fungsi sosialisasi politik yakni sebagai sarana transformasi politik ke masyarakat mengenai bagaimana sebuah partai politik itu bekerja dan menjadi arena menjelaskan kenapa sebuah nilai-nilai dan ideologi tersebut dianut dan apa bagaimana kemanfaatan bagi rakyat pemilih kelak.
 2. Rekrutmen, hampir semua jabatan politik di negara yang dipilih diajukan oleh partai politik, kecuali dalam pencalonan perorangan yang dalam praktik juga butuh dukungan partai politik. Rekrutmen ini harus dipahami dalam 2 (dua) hal, pertama rekrutmen dalam rangka kompetisi jabatan politik dengan tolok ukur kompleks, kedua rekrutmen dalam partai itu sendiri untuk mengisi jabatan-jabatan partai, melaksanakan kerja-kerja partai dan memperbanyak anggota partai, pendukung dan simpatisan.
 3. Manajemen konflik, secara makro partai adalah representasi dari kekuatan sosial di masyarakat yang membentuk kanal-kanal

kepentingan dengan membentuk partai politik dan menyalurkan aspirasi secara fair dan mengurangi konflik berlebihan apalagi dengan kekerasan. Partai dalam negara demokratis adalah upaya penyelesaian dengan cara damai, gagasan yang berbeda, dan diuji di dalam pemilu.

b. Partai dalam negara yang otoriter berfungsi:

1. Sebagai alat kontrol dan melakukan represi kepada warga negara yang tidak sejalan dengan agenda negara dan berupaya membatasi oposisi, hal ini pernah terjadi di Indonesia pada masa orde baru.
2. Melakukan legitimasi kekuasaan, bahkan apabila diperlukan dilakukan maka diadakan pemilu sebagai dasar legitimasi. Di Korea Utara dengan partai tunggal juga lakukan pemungutan suara untuk menguji kesolidan hegemoni partai komunis dan negara.
3. Mobilisasi kekuatan massa jika dibutuhkan dalam rangka perang psikologi untuk membuktikan rezim masih didukung oleh warga negara.
4. Partai juga bisa dipakai untuk melakukan propaganda untuk kepentingan pemerintah dan menjadi penekan bagi kelompok-kelompok yang menentang.

c. Partai pada negara berkembang

1. Selain fungsi pokok partai yang umum, dalam negara berkembang partai politik berfungsi sebagai identitas nasional untuk merekat persatuan terutama bagi negara yang multi etnis, agama dan budaya.
2. Sebagai alat transformasi sosial untuk perbaikan pemerintahan, partai politik dapat menjadi agen untuk pembaharuan politik
3. Karena negara berkembang cenderung rentan soliditas maka partai politik juga digunakan sebagai alat untuk untuk stabilisasi sosial sehingga pemerintahan dapat berjalan efektif, (Budiarjo, 2007).

Pada pemikiran lain juga disebut secara umum fungsionalisasi partai politik mesti memiliki makna ke luar dan ke dalam, makna fungsi parpol diluar sudah banyak dijabarkan seperti diatas, tetapi fungsi internal partai juga menjadi penting yakni pembinaan, kaderisasi, pembekalan ideologi, disiplin organisasi yang keseluruhan untuk mencapai tujuan bagaimana partai politik mencapai tujuan politiknya.

Kegagalan parpol menjalankan fungsinya dapat diidentifikasi yakni terjadi perpecahan internal partai, tradisi yang kuat sukar berubah, organisasi yang kaku, koordinasi yang lemah, serta krisis legitimasi sehingga pihak luar mampu masuk dan merusak, oleh karenanya sebelum melakukan fungsionalisasi partai maka harus diperkuat pelembagaan partai politik, (Samosir, 2022).

2.3 Rekrutmen Politik dan Seleksi Kandidat

Salah satu fungsi dari partai politik adalah melakukan rekrutmen politik yang akan merujuk pada mekanisme yang digunakan oleh partai politik atau kelompok politik untuk menyeleksi dan mengangkat calon-calon dalam suatu pemilihan umum. Rekrutmen penting karena akan menentukan siapa yang akan duduk dalam lembaga legislatif dan eksekutif yang akan menentukan bagaimana kualitas pemimpin yang dihasilkan.

Konsep rekrutmen politik akan mencakup berbagai aspek antara lain:

- a. Proses seleksi, proses ini akan melibatkan organ partai yang secara internal akan mengajukan calon yang akan dinominasikan.
- b. Kriteria pemilihan, penentuan kriteria ini dapat bersifat formal maupun informal karena akan menyangkut banyak aspek antara lain, loyalitas, pengalaman, faktor sosial dan faktor politik lainnya.
- c. Mekanisme pengambilan keputusan, pengambilan keputusan dalam partai politik biasanya dilakukan dalam level pengurus pusat, regional dan lokal partai dengan berbagai metode baik bersifat terbuka atau inklusif dengan melibatkan publik maupun tertutup yakni eksklusif di internal partai saja.

- d. Dampak dan pengaruh terhadap demokrasi setempat, apakah memperkuat legitimasi politik partai, nilai representasi politik, kohesi partai dan stabilitas politik secara keseluruhan di tingkat lokal, (Collier dkk, 2017).

Seleksi kandidat lebih lanjut ditentukan dengan mekanisme memilih kandidat dengan mempertimbangkan:

- a. Proses seleksi yang berdasarkan standar negara secara legal dan standar yang menjadi ruang otonomi partai tersendiri.
- b. Pemenuhan syarat-syarat kandidat baik secara internal maupun legal mengenai siapa saja yang dicalonkan oleh partai dan diakui secara sah oleh negara
- c. Pada level mana seleksi dilakukan, apakah dilakukan secara sentralistik pengurus pusat partai atau terdapat bagian yang secara desentralisasi menjadi wilayah cabang lokal atau regional partai politik.
- d. Apakah terdapat mekanisme internal dalam pencalonan dan siapa saja yang berhak menentukan untuk memilih kandidat tersebut.
- e. Model pemilihan kandidat melalui pemilihan langsung oleh anggota atau pengurus partai, penunjukan dilakukan penunjukan oleh tim kecil partai atau berupa gabungan dari dua mekanisme tersebut.
- f. Tingkatan kematangan kelembagaan versus patronase, apakah seleksi dijalankan secara demokratis atau melalui jalan patronase dan prosedur informal, (Field & Siavelis, 2008).

Proses kandidasi calon adalah dimensi penting dalam proses seleksi calon dalam jabatan politik baik sebagai calon legislatif atau calon kepada daerah di suatu wilayah, selain itu kandidasi juga berlaku dalam internal partai politik yaitu bagaimana seseorang anggota partai politik dapat dicalonkan sebagai pengurus atau elit partai dan mempunyai otoritas kepartaian di wilayah tertentu. Secara umum kandidasi adalah proses dimana seseorang dapat mengajukan dirinya untuk dipertimbangkan sebagai kandidat oleh suatu partai politik dalam sebuah pemilu.

Dalam kandidasi atau proses penyusunan calon dalam pemilu maka akan memerlukan berbagai persyaratan memperkuat eksklusivitas partai antara lain :

- a. Bagaimana status keanggotaan dalam partai tersebut, apakah mencukupi syarat-syarat lama atau tidaknya menjadi anggota partai.
- b. Syarat tambahan adalah apakah kandidat punya relasi dan kontribusi terhadap partai politik, pernah terlibat dalam kegiatan partai atau sikap politik dan perilaku politik selama ini tidak dianggap bertentangan dengan ideologi atau kebijakan partai.

Sedangkan syarat-syarat yang menunjukkan inklusivitas partai dalam kandidasi yakni :

- a. Seberapa mudah seseorang mengakses proses pencalonan, apakah terdapat proses pendaftaran yang terbuka dan apakah seorang calon harus membutuhkan rekomendasi tertentu dari elit partai.
- b. Ketentuan umum sesuai yang dalam peraturan atau undang-undang pemilu atau pilkada.
- c. Ketentuan mengenai aturan atau kebijakan partai apa terpusat, terdesentralisasi atau gabungan dalam menentukan kandidatnya, (Rahat & Hazan, 2001).

Dalam definisi dapat dilihat apakah sebuah partai politik tersebut akan bersifat eksklusif/tertutup atau inklusif dalam pencalonan kandidat dalam pemilu. Mempelajari seleksi kandidat akan membawa kita memahami kondisi sebuah partai yakni dalam penentuan seorang kandidat untuk bertarung dalam jabatan politik maka akan membuka wajah partai ke publik dalam sebuah pemilu, karena seorang kandidat biasanya menjadi representasi dari nilai partai. Dalam seleksi kandidat maka dapat berfungsi yakni sebagai alat menawar di internal partai maupun tawar menawar dalam proses aliansi dengan partai lain.

Terdapat proses verifikasi dan nominasi calon kepala daerah yang dilakukan sebagai tahap awal dengan tujuan menyaring siapa saja yang berhak dan layak menjadi kandidat berdasarkan kriteria partai. Verifikasi dilakukan dengan

melakukan pemeriksaan hubungan dengan parpol, formulir atau dokumen yang dibutuhkan, uji latar belakang pribadi dan politik, uji kaitan dengan ideologi dan syarat lain menyangkut pendidikan, usia dan pengalaman kerja dan pengalaman organisasi. Dalam verifikasi ini biasanya oleh komite kerja partai atau dewan pimpinan partai di lokasi partai berada.

Dalam metode nominasi calon, Hazan & Rahat (2001) membagi dalam 2 (dua) metode yakni :

- a. Sistem Pemungutan Suara, yakni kandidat dipilih melalui pemilihan suara oleh pemilih di internal partai, dengan metode satu putaran atau dua putaran sesuai sistem yang disepakati. Model ini juga menghendaki partai politik membuka diri terhadap aspirasi anggota dan masyarakat umum.
- b. Sistem penunjukan, kandidat ditunjuk langsung oleh pimpinan atau badan internal partai. Mekanisme biasanya dipakai dengan model partai yang sentralistik dan oligarki.

Dalam praktik yang sering terjadi adalah penggabungan kedua sistem tersebut, partai politik mencari yang paling menguntungkan secara politik. Proses seleksi dan nominasi kandidat juga akan tercermin dari tipe sebuah partai politik antara lain, Partai elite akan memilih kandidat secara informal dan eksklusif, Partai massa memilih kandidat berdasarkan keanggotaan partai lebih demokratis tetapi keputusan tetap dikendalikan oleh pusat, Partai *Catch-All-Party* atau partai super terbuka dalam pemilihan kandidat akan lebih pragmatis, lebih luas dan peran pengurus pusat yang masih dominan, Partai Kartel (*cartel party*) seleksi profesional dengan dominasi elit dalam rekrutmen kandidat, terkadang tampak demokratis tetapi pada akhirnya elit pusat partai yang menentukan. Semua model seleksi kandidat diatas tidak menjadi upaya partisipasi masyarakat menjadi meningkat, rakyat hanya disuguhkan untuk menyeleksi dalam pemungutan suara, (Katz, 2001).

Problema dalam melakukan seleksi kandidat pada partai politik bukan sekedar hal teknis dan formal aturan tetapi akan selalu berkaitan dengan relasi kekuasaan, upaya membangun legitimasi, sistem nilai yang dipertahankan oleh partai tersebut. Secara umum problematika dalam seleksi dan nominasi kandidat dalam ranah politik akan muncul antara lain, ketegangan antara demokratisasi yang terbuka dengan kebijakan politik yang sentralistik yang menimbulkan konflik lokal dan pusat, pertarungan internal partai yang dapat menyebabkan krisis legitimasi internal. Dan dalam negara yang masih dalam transisi demokrasi kecenderungan partai politik dalam melakukan seleksi kandidat cenderung terkekang oleh struktur politik dan pelebagaan negara yang belum stabil, sehingga ruang inklusivitas dalam seleksi kandidat tidak dapat dilakukan dengan baik dan butuh waktu untuk proses penguatan pelebagaan partai politik, (Guntoro, 2021).

Rekomendasi yang dianggap layak dalam konteks seleksi kandidat, Katz mengusulkan agar partai politik melakukan berbagai kombinasi demokratisasi dengan memberi ruang lebih pada anggota partai dalam seleksi kandidat dan tetap konsisten pada program atau ideologi partai, dalam proses seleksi juga dijelaskan mengenai alur yang akan dilalui, reformasi struktur partai yang tidak didominasi eliti dan adanya pembagian kewenangan yang otonom di bidang yang ditentukan.

2.4. Demokrasi dan Desentralisasi

Konsep desentralisasi demokrasi merupakan konsep yang saling terkait yang merujuk pada distribusi kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam sistem politik dan administratif. Tujuan dari desentralisasi adalah mendekatkan pengelolaan sektor publik kepada warga negara untuk meningkatkan efisiensi dan merespon kebutuhan yang lebih detail pada pemerintahan tingkat lokal, sedangkan demokrasi berupaya menjamin partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Perpaduan konsep desentralisasi demokrasi mendorong pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih kuat dan transparan karena adanya proses representasi masyarakat, (Villegas, 2018). Desentralisasi secara umum dianggap sebagai cara untuk melakukan transformasi

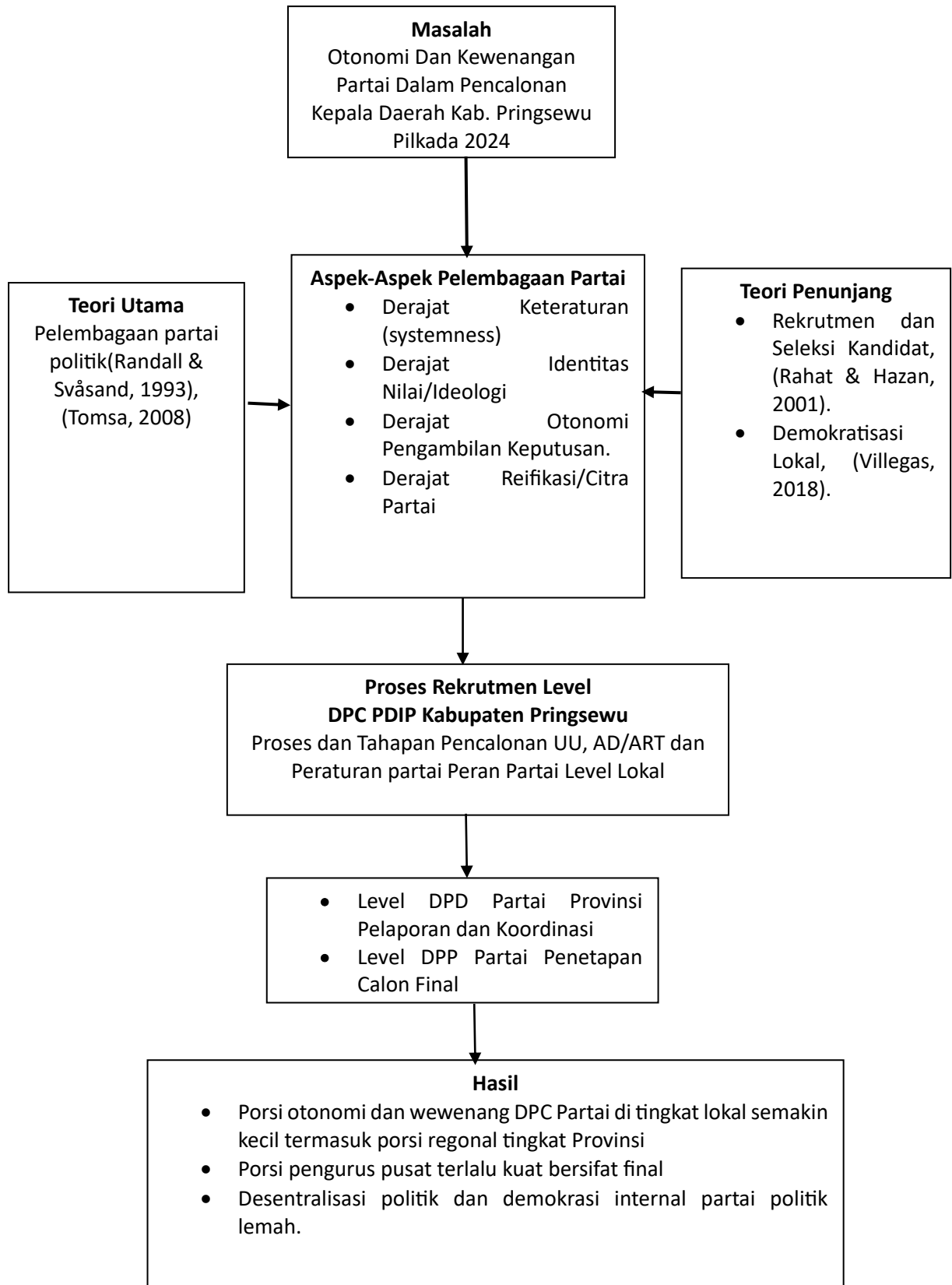
untuk mendukung demokratisasi yang dimulai dari wilayah lokal atau daerah, tetapi dalam konteks pemerintahan lokal desentralisasi selain memiliki tujuan baik juga memiliki potensi kekurangan yakni dapat menyebabkan disparitas atau perbedaan antar daerah, ketidakstabilan ekonomi dan bahkan bisa menjadi sumber inefisiensi dalam pengelolaan pemerintahan lokal karena pemerintah tidak lagi memegang tanggung jawab kewenangan tetapi daerah lokal tidak mempunyai kapasitas mengelola.

Desentralisasi saat ini dipandang sebagai strategi yang penting dalam memperkuat demokrasi hal ini disebabkan proses demokratisasi akan efektif jika disertai dengan desentralisasi kekuasaan baik politik, kewenangan dan keuangan. Kaitan antara desentralisasi dan demokrasi secara evolutif akan meningkatkan partisipasi politik masyarakat lokal, memperkuat stabilitas politik dan membuka ruang deliberasi politik yakni keterbukaan akses publik dalam pembuatan kebijakan di tingkat lokal. Dengan demikian desentralisasi dan demokrasi memiliki potensi simbiotik dalam konteks tertentu yakni berkembangnya tingkat partisipasi dan bersifat inklusif, (Rahmatunnisa, 2011).

Partai politik di tingkat lokal yang memiliki kemampuan untuk mendorong demokratisasi dalam konteks desentralisasi harus mampu melakukan respon dan tantangan yakni desentralisasi seringkali dimanfaatkan oleh elit lokal untuk memperkuat kekuasaan mereka dengan mengontrol partai, sering muncul calon atau kandidat yang berorientasi personal dan bukan pada ideologi partai dan meskipun secara politik terdesentralisasi tetapi struktur partai di internal partai seringkali masih tersentralistik termasuk dalam pencalonan kandidat masih ditentukan pusat dan ini mengurangi otonomi politik di tingkat lokal.

Partai politik di tingkat lokal dalam konteks demokrasi juga memiliki fungsi yakni sebagai agen kompetisi politik dan inovasi kebijakan, mediator masyarakat dan pemerintah lokal, distribusi kekuasaan, keterlibatan dalam lobbying dan pendanaan dan melakukan perluasan representasi politik yang berasal dari pedesaan, (Villegas, 2018).

2.5 Kerangka Pikir



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian kualitatif analisis deskriptif, metode ini digunakan untuk memahami makna dan penafsiran terhadap sebuah fenomena sosial, termasuk fenomena dalam dunia politik dan pemerintahan, model analisis dilakukan dengan melihat kembali hasil temuan dari peneliti sebelumnya dan menjadikan basis teorinya untuk menganalisis temuan yang didapat dalam tahap pengumpulan data dalam penelitian ini. Metode kualitatif dibagi dalam beberapa kelompok, (Creswell, 2018) yakni :

- a. Penelitian fenomenologis, yakni penelitian yang observasi data dengan menggunakan partisipan sebagai mengetahui pengalaman penting dalam hidupnya.
- b. Penelitian menggunakan teori *Grounded*, yakni peneliti yang akan menarik generalisasi terhadap hasil riset induktif yang diambil dari sumber teori dan partisipan yang diteliti.
- c. Penelitian berkaitan etnografi, budaya atau kelompok etnis yang dilakukan observasi.
- d. Penelitian Studi kasus, secara kualitatif melakukan eksplorasi sebuah kasus dengan berbagai teori dan pendekatan
- e. Penelitian naratif, yang lebih bersifat individu dan berbentuk sejarah individu dan disusun dalam bentuk kronologis, (Sugiyono, 2022).

Karakteristik penelitian kualitatif antara lain :

- a. Dilakukan dengan kondisi alamiah dan langsung ke sumber data.
- b. Penelitian bersifat deskriptif dimana data terkumpul dijelaskan dengan narasi.

- c. Lebih melihat sebagai proses bukan hasil akhir.
- d. Analisis induktif dilakukan secara berulang-ulang hingga menemukan temuan-temuan.
- e. Memahami makna suatu gejala dengan lebih mendalam, bahkan makna dibalik angka juga dijelaskan secara naratif.

Penelitian ilmu pemerintahan dan politik pendekatan kualitatif lebih banyak digunakan karena dianggap lebih mewakili, karena spektrum politik yang luas membutuhkan keterbukaan metodologis. Penelitian politik secara kualitatif akan mencari beberapa hal antara lain : kedalaman makna dibalik fenomena, sandaran pada konteks politik tertentu, metodologi yang adaptif membantu memahami secara subyektif dan dapat mengembangkan teori politik yang sudah ada, (Unggul Sagena, 2016).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai upaya untuk fokus pada makna dan pemahaman terhadap konteks, persoalan masalah variabel yang kompleks yang membutuhkan eksplorasi, dan kebutuhan untuk mendalami perspektif secara subyektif untuk memahami emosi dan pengalaman individu. Penelitian kualitatif juga membuat penelitian lebih fleksibel sesuai dinamika yang ditemukan dilapangan yang dapat memperkaya dinamika terhadap konteks yang diteliti dan dapat memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk memahami kedalaman makna yang dapat membantu peneliti untuk menangkap fenomena secara utuh dan kontekstual, menghindari bias dari asumsi awal yang mungkin keliru dan memperkaya hasil analisis dan intepretasi data karena menyesuaikan dengan realitas sebenarnya, (Creswell, 2018).

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ditujukan pada pembahasan rekrutmen dan kewenangan DPC PDI Perjuangan Pringsewu dalam menetapkan calon kepala daerah pada pilkada serentak tahun 2024. Fokus ini akan membantu peneliti dalam mengumpulkan data, menganalisis data dan memastikan data tetap relevan dengan tujuan penelitian, (Abussamad, 2021).

Penulisan ilmiah ini difokuskan pada:

- a. Melakukan review terhadap proses rekrutmen dari mulai pendaftaran, seleksi dan penetapan calon kepala daerah yang dilakukan pada PDI Perjuangan di Kabupaten Pringsewu pada pilkada serentak tahun 2024.
- b. Melakukan identifikasi terhadap otonomi partai dalam rekrutmen calon pada pilkada dikaitkan dengan teori pelebagaan partai politik.
- c. Melakukan identifikasi terhadap hambatan dan tantangan yang menjadi faktor dalam pelaksanaan otonomi partai di tingkat lokal dalam pencalonan dalam pilkada, terutama dalam konteks pelebagaan partai politik.

3.3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi dalam penelitian diperlukan untuk memperjelas lokasi mana yang hendak diteliti dengan memperhatikan aksesibilitas (keterjangkauan) karena penting untuk mengukur waktu dan jarak yang rasional, relevansi dengan penelitian dilakukan dan pertimbangan etis, sosial dan budaya yang memungkinkan, (Silalahi, 2006).

Lokus dari penelitian ini akan dilakukan pada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu, terutama pada dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 dengan dasar penetapan lokasi sesuai metode penelitian studi kasus yakni :

- a. Pemilihan lokasi di Kabupaten Pringsewu bukan semata-mata karena kedekatan geografis tetapi memenuhi syarat kriteria *representative case* yakni PDI Perjuangan merepresentasikan kondisi umum partai politik di Indonesia yang masih sangat sentralistis dengan demikian penelitian relevan untuk menjelaskan pola relasi pusat dan daerah partai politik secara lebih luas.
- b. Lokasi ini secara *typical case* menunjukan sebuah fenomena yang berlangsung normal dan tidak ekstrem. Kabupaten Pringsewu bukan merupakan wilayah yang berkonflik tinggi dan dinamika politik pilkada yang seimbang, kondisi menunjukan PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu sebagai lokasi yang tepat tanpa distorsi politik yang ekstrem.

- c. Kesesuaian dengan proses *tracing* yakni, penelitian berfokus pada alur rekrutmen dan pencalonan kepala daerah. Proses rangkaian tersebut menjadi bagian penelusuran melalui wawancara, dokumen dan pengamatan, dengan demikian peneliti dapat mengungkap lebih dalam kewenangan dan batas-batas otonomi partai di PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu, (Gerring, 2007)

Dengan demikian ketika dikaitkan dengan relevansi teoritis pelebagaan partai politik dapat memberikan kontribusi pada pemahaman otonomi dan kewenangan partai ditingkal lokal dan sistem demokrasi di Indonesia.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis yang sudah disampaikan. Langkah pengumpulan data ini menjadi penting menilai kualitas sebuah penelitian, (A. Rahman, 2022).

Tehnik pengumpulan data yang dipakai antara lain:

- a. Wawancara, sebuah teknik yang dilakukan dengan interaksi langsung dengan panduan wawancara yang sudah didesain. Jenis wawancara dilakukan yaitu dengan cara semi-terstruktur yakni wawancara yang terdapat desain pertanyaan tetapi dapat berkembang topiknya lebih dalam ketika dalam proses wawancara, terhadap panduan wawancara dilakukan dengan menyesuaikan dengan tujuan dan target penelitian.
- b. Observasi, mengamati perilaku dan proses interaksi objek penelitian. Jenis observasi yang dilakukan adalah observasi partisipasi karena peneliti juga banyak terlibat dalam proses yang sedang diteliti, dan melakukan observasi eksploratif untuk mengenali berbagai fenomena yang nampak dipermukaan dan belum banyak diketahui atau diteliti.
- c. Studi dokumen, menganalisis dokumen baik dokumen formal maupun catatan-catatan yang relevan.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan verifikasi mengenai akurasi data sehingga sebelum dilakukan pengumpulan data, perlu dirumuskan data-data yang dibutuhkan dan list yang jelas untuk memudahkan pencarian data dan terfokus.

3.5. Penentuan Jenis Informan

Tabel 3.1. Data Informan dan Temuan Inti

Kode	Nama	Posisi	Temuan Inti
Inf1	Palgunadi, STP (wawancara tanggal 16 September 2025)	Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Pringsewu.	a. Kewenangan DPC dalam penentuan bakal calon. b. Kriteria formal dan informal calon. c. Mekanisme internal penentuan calon. d. Peluang dan kendala otonomi parpol e. Problematika partai dan sistem pemilukada.
Inf2	Heridian, SE, MM (wawancara tanggal 17 September 2025)	Bakal Calon	f. Motif pencalonan dan Pengalaman sebagai bakal calon yang mendaftar g. Pengaruh pembiayaan dalam pilkada h. Model rekrutmen bakal calon di partai. i. Ketidak jelasan mekanisme. Perbedaan perlakuan terhadap kader j. Kendala mendapat koalisi partai
Inf3	Dr.Drs. Wanawir (wawancara tanggal 18 September 2025)	Akademisi UMPRI	k. Peran dan kondisi partai l. Sistem pemilu dan demokrasi lokal. m. Partisipas dan keterlibatan masyarakat.
Inf4	Hj. Umi Laila,Sag (Wawancara tanggal 18 September 2025)	Ketua DPC Gerindra dan	n. Mekanisme pencalonan di partai Gerindra.

Kode	Nama	Posisi	Temuan Inti
		Wakil Bupati Pringsewu	o. Tantangan dan pertimbangan dalam pencalonan.
Inf5	Umbar Susilo, Sag (wawancara tanggal 18 September 2025)	Ketua Kormi, pendiri rumah inspirasi Kabupaten Pringsewu.	p. Kondisi peran partai politik di tingkat lokal q. Tantangan proses pencalonan. r. Paradoks demokrasi dalam pilkada.
Inf6	Ari Suseno, SPd (wawancara tanggal 19 September 2025)	Kepala sekretariat partai	s. Prosedur administrasi pencalonan. t. Tantangan dan kendala.
Inf7	Andreas Andoyo, S.Sos. MTI (Wawancara tanggal 19 September)	Bakal Calon, kader PPP	u. Informasi rekrutmen pilkada di PPP. v. Otonomi partai di tingkat lokal. w. Kondisi politik dan demokrasi x. Problema partai PPP
Inf8	Imop Sutopo, SE (wawancara tanggal 19 September 2025)	Ketua Harian P3KP.	y. Kondisi partai politik dan demokrasi di tingkat lokal. z. Masalah-masalah dalam pencalonan kepala daerah. aa. Peran P3KP sebagai ormas bb. Rekomendasi.
Inf9	Joko Sulistyio (Wawancara tanggal 21 September 2025)	Ketua PWI	cc. Dominasi partai pusat dd. Peran tokoh lokal ee. Dominasi transaksional ff. Pendidikan politik masyarakat
Inf10	Agus Suwignyo (Wawancara tanggal 21 September 2025)	Jurnalis Senior, Radar Lampung	gg. Ketergantungan partai lokal pada hirarki pusat. hh. Partai dan demokrasi lokal ii. Evaluasi partai dan sistem pemilu jj. Perluasan kewenangan pengurus partai lokal. kk. Politik uang ll. Partisipasi publik, media dalam demokrasi.

Kode	Nama	Posisi	Temuan Inti
Inf11	Aris Wahyudi, ST (Wawancara tanggal 21 September 2025)	Bakal Calon, pengurus DPC PDI Perjuangan	mm. Mekanisme dan sistem rekrutmen pilkada sekarang dan sebelumnya. nn. Kriteria calon kepala daerah. oo. Aspek finansial dalam pencalonan. pp. Pentingnya verifikasi faktual untuk bakal calon. qq. Pilkada dan pengaruh terhadap partai.
Inf12	Agus Irwanto, SE (Wawancara tanggal 24 September 2025)	Pengurus DPC, Ketua Komisi IV DPRD Kab. Pringsewu	rr. Peran pengurus dan aspirasi kader. ss. Mekanisme penjangkaran dan kaderisasi. tt. Kewenangan lokal dan intervensi. uu. Kekuatan ekonomi calon dan politik transaksional. vv. Komitmen calon.
Inf13	Agus Purnomo (Wawancara tanggal 24 September 2025)	Pengurus DPC, Jurnalis Siger TV	ww. Proses penentuan calon. xx. Dinamika internal. yy. Otonomi dan kendala eksternal. zz. Ideologi dalam pemilihan calon.
Inf14	Dr. Fauzi (Wawancara tanggal 25 September 2025)	Calon yang ditetapkan dalam pilkada 2024. Wakil Bupati periode 2017-2022.	aaa. Pengalaman proses pencalonan bersama partai pengusung. bbb. Dinamika internal partai. ccc. Respon dukungan akar rumput partai dan umum. ddd. Problem demokrasi dalam pilkada langsung. eee. Lobi politik dan negosiasi. fff. Nilai dan ideologi.
Inf15	Miswan Gumanti, MBA, MM	Akademisi IBN.	ggg. Dominasi pengurus pusat partai. hhh. Fenomena politik uang

Kode	Nama	Posisi	Temuan Inti
	(Wawancara tanggal 25 September 2025)	Mantan pengurus partai Hanura.	iii. Lemahnya meritokrasi. jjj. Calon misterius dan perubahan dukungan. kkk. Opsi pilkada dan transformasi demokrasi.
Inf16	Dr. Watono Nurdin, SH, MH (Wawancara tanggal 29 September 2025)	Ketua tim penjangkaran provinsi. Wakil ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung.	lll. Peran dan fungsi DPC dan DPD dalam rekrutmen calon. mmm. Mekanisme pengambilan keputusan dan koordinasi. nnn. Kendala tim rekrutmen DPD. ooo. Pertimbangan penilaian calon. ppp. Gangguan dan otonomi partai
Inf17	Ir. Sutono, MM (Wawancara tanggal 30 September 2025)	Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung	qqq. Peran dan fungsi DPD dan DPC dalam pencalonan. rrr. Sistem dan aturan internal dalam menentukan calon dari kader. sss. Faktor penentu pencalonan kepala daerah. ttt. Ketegangan DPC dan DPD uuu. Peran pilkada bagi konsolidasi partai.

Sumber : Data diolah penulis, (2025)

3.6. Teknik Pengolahan Data

Analisis pengolahan terhadap data yang diperoleh menghasilkan informasi bagi peneliti dengan model-model pengolahan data dibawah ini :

- a. Reduksi Data, yakni seringkali peneliti menemukan data yang begitu banyak dan besar, sehingga menjadi kesulitan peneliti jika dilakukan pemilahan, untuk itu diperlukan penyederhanaan data untuk memudahkan analisis dan interpretasi data, bentuknya dapat berupa pemilihan data, kategorisasi dan sintesis data.

- b. Penyajian Data disajikan dalam bentuk yang sederhana dalam bentuk gambar dan grafik untuk memudahkan penafsiran dalam penelitian
- c. Kesimpulan, merupakan hasil rangkuman analisis data dengan memberikan interpretasi yang jelas terhadap data-data yang didapat, (Sugiyono, 2022: 165-170).

3.7. Teknik Analisa Data

Data-data yang sudah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumen dilakukan analisis dengan cara :

- a. Melakukan identifikasi tema atau pola dari data yang diperoleh, memberikan kode dan pengelompokan pada bagian-bagian yang penting.
- b. Melakukan analisis isi dengan melakukan kategori tertentu baik kalimat, pernyataan dan melakukan penafsiran terhadap konteks pernyataan tersebut.
- c. Analisis naratif dengan melakukan pemahaman secara menyeluruh terhadap seluruh cerita dan pengalaman yang dirasakan dan dipahami oleh informan.
- d. Melakukan analisis fenomenologis dengan membaca data wawancara, deskripsi narasi dan melakukan identifikasi terhadap makna-makna yang penting yang didapat dari informan.
- e. Menyajikan data dalam bentuk display agar mudah dipahami baik dalam bentuk narasi, matriks atau tabel untuk menemukan pola, hubungan dan makna yang dapat ditarik sebagai verifikasi untuk membuat kesimpulan dan melakukan interpretasi makna, (Abussamad, 2021)

3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Proses pemeriksaan penting dalam rangka memastikan bahwa data yang disajikan valid dan reliabel atau dapat diandalkan, metode yang digunakan yakni dengan menggunakan triangulasi data dengan menggunakan berbagai sumber antara lain yaitu : menggunakan berbagai sumber untuk menguji konsistensi informasi baik dengan model wawancara, observasi dan dokumen, (M. Husnullail, 2024).

Proses triangulasi dilakukan dengan menggunakan panel peneliti untuk melihat dari sudut pandang lain, bahkan jika memungkinkan data yang sama diuji dengan teori yang berbeda untuk memperkaya sudut pandang. Penerapan triangulasi data akan membantu peneliti meningkatkan keandalan dan validitas temuan penelitian dan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena sosial yang sedang diteliti, (Silalahi, 2006). Triangulasi yang dipakai adalah triangulasi sumber data, yakni data yang diambil dari dokumen maupun informasi-informasi kemudian dilakukan perbandingan satu sama lain dan kemudian disandingkan juga dengan hasil observasi lapangan dan hasil wawancara, kegiatan tersebut dilakukan untuk menguji konsistensi informasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Secara umum kesimpulan penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama dalam penelitian dan menguji teori pelebagaan partai politik dilapangan, dengan temuan kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Rekrutmen Kepala Daerah Di Tingkat Lokal

Proses rekrutmen kepala daerah di tingkat lokal pada pilkada serentak tahun 2024, khususnya pada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu, secara formal sudah dilaksanakan melalui mekanisme terbuka, terstruktur dan berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, AD/ART partai serta peraturan internal PDI Perjuangan. Pada tingkat lokal PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu sudah menjalankan fungsi penjangkaran awal dengan membuka pendaftaran bagi kader dan non-kader, melakukan verifikasi administratif, menghimpun aspirasi politik lokal. Mekanisme ini menunjukkan bahwa partai politik ditingkat lokal tetap memiliki peran dalam proses rekrutmen kepala daerah.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa kewenangan strategis dalam rekrutmen kepala daerah masih sangat terpusat elit utama partai politik. Peran DPC dan DPD pada praktiknya terbatas pada fungsi administratif dan penyampaian rekomendasi calon yang tidak bersifat mengikat. Penetapan pasangan masih menjadi kendali utama pengurus partai pusat dengan pertimbangan utama berupa elektabilitas, kekuatan finansial dan kepentingan strategis partai secara nasional. Kondisi menyebabkan otonomi partai ditingkat lokal menjadi rendah dan aspirasi politik kader daerah pengambilan keputusan menjadi lemah. Terdapat temuan kewenangan-kewenangan kecil dalam rekrutmen kepala daerah yang dilakukan oleh DPC dan DPD pada PDI Perjuangan, tetapi hal tersebut bukan menjadi model

keteraturan atau “*systemness*” sebagai wujud dari derajat otonomi lokal. Kondisi sentralisme kewenangan dalam rekrutmen kepala daerah tersebut mengakibatkan lemahnya demokratisasi di internal partai, dan ini tidak sejalan dengan gagasan desentralisasi pemerintahan dengan desentralisasi di tubuh partai politik. Proses politik yang elitis dan pragmatis dan praktik transaksional dan budaya klientelisme mendegradasi kepercayaan kepada partai dan berdampak pada kecenderungan pilihan yang berpindah-pindah (*volatilitas*) dan menunjukkan ketidakstabilan kepercayaan publik pada partai.

2. Kewenangan Partai Dalam Rekrutmen Kepala Daerah di Tingkat Lokal

Kewenangan partai politik tingkat lokal pada pilkada serentak 2024 khususnya di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu memiliki mekanisme berjenjang dari kabupaten hingga pusat, ditingkat lokal partai politik memiliki kewenangan terbatas, bersifat prosedural tetapi tidak mencakup kewenangan pengambilan keputusan strategis dalam penetapan kepala daerah, partai ditingkat lokal berfungsi lebih pada pelaksana teknis dalam rekrutmen partai. Temuan penelitian menunjukan otonomi pengambilan keputusan (*decisional autonomy*) di PDI Perjuangan belum memiliki format yang sesuai dengan hirarki organisasi baik level DPC, DPD dan DPP.

Secara empiris, kewenangan substantif dalam rekrutmen kepala daerah masih terkonsentrasi pada pengurus pusat partai, mekanisme rekrutmen masih mencerminkan kontrol elite partai yang didalamnya masih kuat praktik patronase dan oligarki elite partai. Konsekuensi dari kondisi ini adalah demokrasi internal partai dan desentralisasi politik di tingkat lokal menjadi lemah. Menjadi kebutuhan utama untuk merumuskan kewenangan secara proporsional pusat dan daerah yang akan mendorong partai di tingkat lokal lebih adaptif dan memberi kontribusi terhadap agenda demokratisasi di tingkat lokal.

3. Dimensi Pelembagaan Partai Politik

Dalam perspektif teori pelembagaan partai politik terutama pada praktek politik partai politik tingkat lokal dalam rekrutmen kepala daerah di DPC PDIP Kabupaten

Pringsewu dapat disimpulkan yakni : Terhadap dimensi pengaturan partai (*systemness*) secara formal partai sudah memiliki prosedur yang tertata melalui mekanisme panjaringan dan tahapan berjenjang dari DPC hingga DPP partai, namun dalam prakteknya sistem tersebut belum sepenuhnya berjalan konsisten dan masih banyak menghadapi ketidakteraturan dalam implementasi baik bersifat administratif maupun substansi. Dalam studi ini dan studi yang lain ditemukan di PDI Perjuangan terdapat calon kepala daerah yang tidak mengikuti proses penjaringan dalam rekrutmen kepala daerah di level lokal tetapi kemudian melakukan “bypaas” atau mendorong keputusan sepihak dari pusat dan daerah hanya menerima saja, situasi ini menandakan dimensi derajat keteraturan menjadi sangat rendah.

Dalam dimensi nilai (*value infusion*), rekrutmen kandidat belum sepenuhnya didasarkan pada internalisasi nilai dan ideologi partai, melainkan lebih banyak dipengaruhi pertimbangan pragmatis seperti elektabilitas, popularitas dan kekuatan finansial calon. Kondisi tersebut menunjukkan seleksi belum menjadi instrumen kaderisasi ideologis yang mampu memperkuat identitas partai sehingga dampaknya pelembagaan partai politik mengalami pelemahan. Elit-elit partai dalam melakukan rekrutmen atau penilaian kelayakan *fit and proper test* , tidak memberi perhatian lebih dalam mengenai nilai dan ideologi partai seseorang yang hendak dicalonkan baik kriteria maupun standar yang akan digunakan. Dalam aspek dimensi otonomi dalam pengambilan keputusan (*decisional autonomy*), temuan penelitian menegaskan kondisi rendahnya otonomi pengambilan keputusan ditingkat lokal dalam penentuan calon kepala daerah. Kewenangan utama terkonsentrasi di DPP partai, sementara DPC hanya memiliki kewenangan administratif, sentralisasi keputusan ini memperlihatkan ketimpangan relasi pusat-daerah dalam struktur partai dan mengakibatkan pelembagaan partai ditingkat lokal menjadi tidak otonom dan kurang demokratis.

Aspek otonomi pengambilan keputusan dalam partai ini kurang selaras dengan kebijakan desentralisasi pemerintahan daerah yang membagi kewenangan dalam tingkatan-tingkatan secara lebih substantif, sehingga diharapkan terdapat hirarki

kewenangan yang otonom partai di tingkat daerah. Pada dimensi citra publik (*reification*), partai sebagai institusi demokrasi ditingkat lokal cenderung mengalami pelemahan, hal ini karena masyarakat menganggap proses rekrutmen dilakukan secara tertutup, elitis dan rentan praktek patronase. Kepercayaan masyarakat kepada partai politik sebagai saluran representasi politik telah jauh berkurang, terutama dalam rekrutmen calon kepala daerah. PDI Perjuangan sendiri dalam rekrutmen kepala daerah tidak ditemukan indikator citra partai nasionalis dalam menentukan calon, sehingga identitas partai menjadi tidak tergambar secara utuh di ruang publik. Sebagai kalimat kunci dalam konteks pelembagaan partai politik, kondisi ditingkat lokal masih menghadapi pragmatisme politik dan lemahnya demokrasi internal partai dan membutuhkan penguatan lebih lanjut yang lebih substantif pada partai politik tingkat lokal.

4. Implikasi Hasil Penelitian Terhadap PDI Perjuangan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terhadap temuan-temuan yang memiliki implikasi bagi PDI Perjuangan antara lain : hubungan elit partai dan massa partai ditengah menguatnya sentralisasi elit partai mengakibatkan massa partai hanya menjadi objek yang digunakan untuk kepentingan mobilisasi politik yang merupakan hasil instruksi elit partai, kondisi ini terjadi karena massa partai belum menjadi kader atau anggota yang memiliki kompetensi yang baik dalam berpartai, situasi tersebut akan berdampak pada lemahnya demokrasi internal partai. Pada sektor ideologisasi dalam partai di PDI Perjuangan juga tidak didapati instrumen yang jelas untuk mengukur standar nilai atau ideologi yang dapat verifikasi atau dilihat oleh publik terhadap PDI Perjuangan, sehingga nilai dan ideologi sering kali terlihat samar-samar dan secara tipikal dapat disebut PDI Perjuangan adalah partai dengan tipe *nasionalis-patrimonial*. Dalam jangka panjang masa depan PDI Perjuangan akan bergantung dari kemampuan partai untuk mengadaptasi relasi sosiologis massa dengan partai dan upaya partai membangun demokrasi di internal partai yang juga menjadi tantangan utama partai-partai di Indonesia pada saat ini

5.2. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Saran Teoritis

Temuan penelitian ini mengindikasikan perlunya rekonstruksi konseptual terhadap teori pelebagaan partai politik dengan menempatkan otonomi partai ditingkat lokal sebagai variabel institusional yang bersifat determinan. Pendekatan pelebagaan partai politik klasik yang menitikberatkan pada stabilitas organisasi, sistem keteraturan dan otonomi pengambilan keputusan secara agregat belum sepenuhnya mampu menangkap relasi kuasa asimetris antara pusat dan daerah dan tubuh partai politik. Penelitian ini juga menunjukkan kelemahan otonomi struktural partai politik tingkat lokal mengindikasikan kegagalan pelebagaan partai dalam mentransformasikan desentralisasi pemerintahan dan desentralisasi politik.

Kajian rekrutmen politik dan demokrasi lokal perlu dikembangkan melalui sintesis teoritis antara teori seleksi kandidat, institusionalisme baru dan teori desentralisasi politik. Rekrutmen yang secara prosedural bersifat terbuka tidak secara otomatis dipahami sebagai praktik demokrasi, jika keputusan akhir tetap dikontrol pusat. Fungsi-fungsi partai politik akan terus berkembang sebagai arena mediasi relasi antara negara terdesentralisasi dan demokrasi lokal, pengembangan teori kedepan harus memandang reformasi internal partai khususnya kaitan kewenangan pusat dan daerah, sebagai prasyarat struktural konsolidasi demokrasi dan pelebagaan politik di tingkat lokal.

2. Saran Praktis

PDI Perjuangan sebagai partai politik yang besar disarankan untuk melakukan penataan dan memperkuat distribusi kewenangan antara DPP, DPD dan DPC agar proses rekrutmen menjadi lebih demokratis. Pemberian kewenangan dimaksud dalam kaitan mekanisme rekrutmen yang transparan dan terukur, penguatan sistem kaderisasi berbasis meritokrasi untuk mengurangi dominasi pragmatisme politik. Perlu ada upaya kebijakan umum pemerintah yang mampu menyingkronisasi desentralisasi pemerintah daerah dan tata kelola partai politik ditingkat lokal,

sehingga proses rekrutmen kepala daerah selain kebutuhan politik dalam jangka pendek juga sebagai upaya mendukung demokrasi lokal dan pelebagaan partai politik secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- John W. Creswell. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage. <https://doi.org/10.2307/j.ctt2204s7w.11>
- Abussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Patta Rapanna, Ed.). Syakir Media Press.
- Aminuddin, M. F., & Ramadhan, M. F. S. (2015). Match-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009. *Jurnal Politik*, 1(1). <https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.9>
- Ananda Adhianugrah, M., Djumadin, Z., & kunci Politik, K. (2023). NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dinamika Oligarki dalam Pilkada Kota Medan 2020: Analisis Pengaruh Elit Politik, 5(1), 380–391.
- Anggoro, M. dkk. (2020). Rekrutmen Politik Calon Kepala Daerah (Studi Tentang Seleksi Kandidat Pada Partai Amanat Nasional Pada Pemilukada di Kota Tasikmalaya Tahun 2017). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(1), 95–106. <https://doi.org/10.24042/tps.v16i1.6125>
- Antara. (2011). Ini Peserta Pilkada Pringsewu. Retrieved from <https://lampung.antaranews.com/berita/259960/ini-peserta-pilkada-pringsewu>
- Awang, E., Putra, M., Hukum, F., Bumigora, U., & Barat, N. T. (2024). Penguatan Ideologi Partai Politik dalam Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia. *Lex Renaissance*, 9(December), 423–449.
- Bappeda. (2022). Sejarah Kabupaten Pringsewu. Retrieved from <https://bappeda.pringsewukab.go.id/berita/profil/sejarah-kabupaten-pringsewu>
- Bariyah, N. (2022). Demokrasi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(2), 53–64. <https://doi.org/10.21009/jimd.v21i2.23071>
- BPS. (2025). *Proyeksi Penduduk Kabupaten Pringsewu 2025*. Retrieved from <https://pringsewukab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjExIzI=/proyeksi-penduduk-kabupaten-pringsewu.html>
- BRIN. (2024). *BRIN Luncurkan Indeks Pelembagaan Partai Politik Pertama di Indonesia*. Retrieved from <https://www.brin.go.id/news/121336/brin-luncurkan-indeks-pelembagaan-partai-politik-pertama-di-indonesia>

- Budiarjo, M. (2007). *Dasar Dasar ilmu politik*. pt. gramedia pustaka utama.
- Coller, X., Jaime-Castillo, A. M., & Mota, F. (2017). Political power in Spain: The multiple divides between MPs and citizens. *Political Power in Spain: The Multiple Divides between MPs and Citizens*, (March), 1–327. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-63826-3>
- Detik.com. (n.d.). 35 Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Lampung, Ini Daftar Lengkapnya Baca artikel detiksumbagsel, “35 Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Lampung, Ini Daftar Lengkapnya” selengkapnya <https://www.detik.com/sumbagsel/pilkada/d-7518504/35-pasangan-calon>. Retrieved from <https://www.detik.com/sumbagsel/pilkada/d-7518504/35-pasangan-calon-kepala-daerah-provinsi-lampung-ini-daftar-lengkapnyade>
- Edward Aspinall, G. F. (2003). *Lokal Power and Politics in Indonesia, Decentralisation & Democratisation*. Indonesia Update Series and POLITICS in LOCAL POWER INDONESIA Decentralisation & Institute of Southeast Asian Studies.
- F, B., & Irfan, M. (2025). Peranan Partai Politik Dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Kepala Daerah Di Tulungagung (Studi Kasus Pemenangan Pasangan Calon Bupati Gabah). *Dinamically*, 01(01), 50–63.
- Fadlurrohman, A. Z. (2017). Problem Pelembagaan Partai Politik Dalam Pilkada Serentak Jawa Timur. *Transformatif*.
- Faguet, J. P. (2012). Decentralization and popular democracy : Governance from below in Bolivia. *Decentralization and Popular Democracy : Governance from Below in Bolivia*, 1–358. <https://doi.org/10.5860/choice.50-3489>
- Field, B. N., & Siavelis, P. M. (2008). Candidate selection procedures in transitional polities: A research note. *Party Politics*, 14(5), 620–639. <https://doi.org/10.1177/1354068808093393>
- Firmanzah. (2018). *Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Pustaka Obor Jakarta.
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>
- Gerring, J. (2007). *Case Study Research, Principles And Practices*. Cambridge University Press.
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi dan demokratisasi. *Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon*, 3(2), 416. Retrieved from <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=mF6bdlj8qrYC&oi=fnd&pg=PA3&dq=akuntabilitas+dan+transparansi+dana+bantuan&ots=eAmY321XJ7&sig=gwtH9f6GCUUR8zcoYTf1qKpoiTc>

- Gyarani, A., Rifqi, J., & Putranto, A. (2025). Peranan Komunikasi Publik pada Partai Pengusung Pilkada 2024 Kabupaten Bogor (Studi Terhadap Pasangan No 1 Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi) Abstrak, 6(1), 706–718.
- Hal, P. A., & C.R.Taylor, R. (1996). Political science and the three new institutionalisms. *Political Studies*. Retrieved from <http://stats.lib.pdx.edu/proxy.php?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rlh&AN=9705162186&site=ehost-live>
- Hasnu, H., & Syam, F. (2021). Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme PDIP dan Islam Moderat PKB. *Syntax Idea*, 3(7), 1620–1634. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i7.1252>
- Hermawan, A. A., & Suharyana, Y. (2021). Implementasi Pembangunan Demokratisasi Di Provinsi Banten (Studi Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak Tahun 2018 – 2020 Di Provinsi Banten). *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 5(2), 71–85. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v5i2.147>
- Heywood, A. (2019). *Politics* (FIFTH EDIT). Red Globe Press.
- Huntington, S. P., & Fukuyama, F. (2006). *Political order in changing societies*. *Political Order in Changing Societies*. <https://doi.org/10.5771/0506-7286-1970-2-257>
- Irgiawan, M. Z. (2023). *Dinamika Partai Politik Dalam Memutuskan Dukungan Pada Calon Bupati Tunggal Pilkada Kabupaten bone 2018*. Universitas Hasanuddin.
- Isabela, M. A. C. (2022). Tipologi Partai Politik. *Kompas*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/05/01000091/tipologi-partai-politik>
- Jamil, D., Maksu, A., Sopyan, A. R., & Huda, A. (2024). Pelembagaan Partai Politik: Studi Kasus Partai Koalisi Incumbent Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada. *Jurnal Dinamika*, 5(1), 45–62. <https://doi.org/10.18326/dinamika.v5i1.45-62>
- Jurdi, B. dkk. (2024). Analisis Terhadap Sistem Pemilu Indonesia: dari Proporsional Tertutup ke Proporsional Terbuka. *Vox Populi*, 6(2), 145–161. <https://doi.org/10.24252/vp.v6i2.44274>
- Katz, R. S. (2001). The problem of candidate selection and models of party democracy. *Party Politics*, 7(3), 277–296. <https://doi.org/10.1177/1354068801007003002>
- Katz, R. S., & Mair, P. (1994). The Evolution of Party Organizations in Europe: The Three Faces of Party Organization. *American Review of Politics*, 14, 593–617. <https://doi.org/10.15763/issn.2374-7781.1993.14.0.593-617>
- Kupastuntas. (2024). Pasangan Riyanto-Umi Laila Resmi Daftar Ke KPU Pringsewu. Retrieved from <https://kupastuntas.co/2024/08/29/paslon-riyanto-umi-laila-resmi-daftar-ke-kpu-pringsewu>

- Kurniawan, F. H. (2025). Peristiwa Kudatuli 1996: Gerakan Rakyat dan Pertarungan Politik di Masa Orde Baru. *Jambura History and Culture Journal*, 7(1), 1–23. <https://doi.org/10.37905/jhcj.v7i1.28805>
- Leda, H. A. (2023). Orientasi Pembentukan Koalisi dan Fragmentasi Kepentingan dalam Penentuan Calon Wakil Bupati Ende Sisa Masa Jabatan 2019-2023. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2322–2330. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1635>
- Leo, A., Mona, S., & Jonah, S. (2023). Institusionalisasi Dan Ketahanan Partai Dalam Demokrasi Elektoral Indonesia: *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(1), 105–130. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i1.129>
- M. Husnullail, D. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*.
- M. Zubakhrum B. Tjenreng. (2020). *Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak. Papas Sinar Sinanti* (Vol. 11).
- Madani, A. A. (2023). Dinamika Politik Kyai Dalam Proses Demokratisasi Lokal Pada Pilkada Pamekasan. *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 8(1), 1–21. Retrieved from <https://ejournal.idia.ac.id/index.php/dirosat/article/download/1293/851>
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1983). The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life. *American Political Science Review*, 78(3), 734–749. <https://doi.org/10.2307/1961840>
- Marwazi, R., & Fatimah, S. (2019). Demokrasi dan Partai Lokal : Mencermati Dinamika Pemilihan Umum di Aceh Democracy and Local Parties : Examining the Dynamics of General Elections in Aceh. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10(1), 13.
- Micze Ridua, S. (2025). Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Honeste Vivere*, 35(2), 206–216. <https://doi.org/10.55809/hv.v35i2.567>
- Muh Suparman, S., & Rahmatunnisa, M. (2022). Konflik Internal PPP Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Jawa Barat 2018 Dan Penyelesaiannya PPP Internal Conflict During 2018 Election of Regional Head in West Java and Its Settlement. *Jurnal Administrasi Negara*, Februari, 13(2), 331–335. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2015/04/13/0123/Politisi.PPP>.
- Mukaromah, K., Alfirdaus, L. K., & . F. (2022). Politik Keluarga Dan Pola Rekrutmen Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020. *Reformasi*, 12(1), 44–54. <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i1.3305>

- Nika, I. (2021). Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik melalui Pola Rekrutmen Partai Politik. *I.F.X Renaissance*, 6(3), 562–577.
- PDIP. (2024). *Nama-Nama Pendaftar Calon Bupati dan Wakil Bupati di PDI Perjuangan Kab. Pringsewu*.
- Permana, P. A. (2022). Kontradiksi Struktural dalam Politik Lokal Indonesia Pasca Orde Baru, 1(2), 56–69.
- PKPU. PKPU No. 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (2024).
- Prayudi. (2019). Permasalahan Kelembagaan Demokrasi Dalam Partai Politik. *Info Singkat, Pusat Penelitian Keahlian DPR RI*, 11(6), 25–30.
- Prihatmoko, J. J. (2022). Rekrutmen PDIP dalam Pilkada 2020: Antara Strategi Pemenangan dan Pelembagaan Partai Politik. *Spektrum*, 19(2), 1–25. <https://doi.org/10.31942/spektrum.v19i2.6655>
- Rachmayani, I., & Warganegara, A. (2023). Institusionalisasi Partai Politik (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 389–398. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.2761>
- Rahat, G., & Hazan, R. Y. (2001). Candidate selection methods: An analytical framework. *Party Politics*, 7(3), 297–322. <https://doi.org/10.1177/1354068801007003003>
- Rahman, A. (2022). *Metode Penelitian ilmu sosial*, (2022), Bandung.
- Rahman, R. A., Satriawan, I., & Diaz, R. M. (2022). Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi [Single Candidate Pilkada: Leadership Crisis and Threat to Democracy]. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 47–72.
- Randall, V., & Svåsand, L. (1993). Party Institusionalization in New Democracies. *Party Politics*, 0688(200201), 5–29.
- RMOL. (2025). Demokrasi di Tubaba Lumpuh Total, Ribuan Jarum Siap Menangkan Kotak Kosong. *RMOLLAMPUNG*. Retrieved from <https://rmollampung.id/demokrasi-di-tubaba-lumpuh-total-ribuan-jarum-siap-menangkan-kotak-kosong>
- Rosyan, A. N., & Prasajo, E. (2024). Pemilihan Umum dan Budaya Patronase: Mahalnya Biaya Politik di Tengah Berkembangnya Sistem Meritokrasi. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 12(1), 47–63. <https://doi.org/10.31289/publika.v12i1.11791>
- Samosir, O. (2022). *Partai Politik Pada Abad 21 : Pengertian , Fungsi , dan Praktek di Indonesia Pengantar : Dr . Dhaniswara K . Harjono , S . H . , M . H . , M . B . A .*
- Silalahi, U. (2006). Metode Penelitian. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 216.

- Siti Witianti, dan H. (2019). Peran Ketua Umum Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 4(1), 55–67.
- Subhan. (2024). Model Pencitraan Politik (Reification) dalam Institusionalisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tasikmalaya tahun 2014-2020. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 10, 34–49.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. ALFABETA BANDUNG.
- Suryani, R., & Suryanef, S. (2022). Program Pendidikan Politik oleh Partai Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menghadapi Pilkada 2020. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 2(1), 46–54. <https://doi.org/10.24036/jecco.v2i1.10>
- Suyide, N. (2023). Peran Partai Politik Pengusung Dalam Pemenangan Calon Kepala Daerah Di Kabupaten Magetan. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(September), 31–36.
- Tilly, C. (2000). Processes and Mechanisms of Democratization. *Columbia University*, 10(2). Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1016/j.meatsci.2017.01.005%0Ahttps://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0309174016301395>
- Tomsa, D. (2008). *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the post-Suharto era. Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Suharto Era*. <https://doi.org/10.4324/9780203892749>
- Unggul Sagena, MPP, MA, M. T., Herman Lawelai, S.I.P., M. I. ., Dr. Herman Dema, S.Pd., S.I.P., M. S., Sundari S.A.P., M. A. ., Hardianti, S.A.P., M. A. ., & Irawati, S Sos., M. . (2016). *Metode Penelitian Sub Rumpun Ilmu Politik (Teori & Referensi berbasis Studi Kasus)*.
- Valentina, As. (2022). *Rekrutmen Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal*. Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang.
- Villegas, F. G. (2018). *Descentralización Y Democracia: Lecturas básicas de administración y políticas públicas*. <https://doi.org/10.2307/j.ctv6jmx1d.17>
- Wahyudi, A. (2021). *Rekrutmen Politik : Studi Kasus Pencalonan Gibran Rakabuming Raka Pada Pilkada Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tahyn 2020 Di Kota Surakarta*.
- Widyanto, K. (2022). Studi Tiga Wajah Partai: Otonomi dalam PDI Perjuangan di Surakarta. *Jurnal PolGov*, 4(1), 245–280. <https://doi.org/10.22146/polgov.v4i1.4441>

- Witianti, S., Nazsir, N., Bainus, A., Rahmatunnisa, M., & Azmi, M. F. (2021). Proses Rekrutmen Dan Seleksi Kandidat Di Internal Pdi Perjuangan Pada Pilkada Cimahi Tahun 2017. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(2), 151. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i2.35728>
- Yansen, A. (2025). *Fungsi dan Tantangan Partai Politik dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Inklusif. Prosiding Seminar Nasional Indonesia* (Vol. 3).